

**PARTAI MASYUMI CABANG SULAWESI SELATAN  
DAN PERJUANGANNYA  
1950--1960**



PERPUSTAKAAN POKOK UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	05-05-95
Asal dari	-
banyaknya	2 (dua)
Harga	H
No. Inventaris	952205309
No. Rms	

**Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti  
ujian, guna memperoleh gelar Sarjana sastra pada  
Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin**

**OLEH**

**MULYADI**

**88 07 220**

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG**

**1995**

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA

Berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Sastra  
Nomor. 2240/PT04. H5. FS/C/1995. Dengan ini kami  
menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Ujung Pandang 22 Januari 1995

Pembimbing Utama



Drs. Daud Limbugau SU.  
Nip.130 190 505

Pembantu Pembimbing



Drs. Anwar Thosibo, M.Hum.  
Nip. 131 571 401

Disetujui untuk diteruskan kepada  
Panitia Ujian Skripsi.

Dekan,  
u.b. Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi  
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin



Drs. Daud Limbugau SU.  
Nip. 130 190 505

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini, Rabu 1 Pebruari 1995 skripsi yang berjudul  
"Partai Masyumi Cabang Sulawesi Selatan dan Perjuangannya  
1950-1960.

Telah diterima oleh panitia ujian sarjana untuk memenuhi  
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Lengkap  
pada Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Univer  
sitas Hasanuddin.

Ujung Pandang 1 Pebruari 1995

PANITIA UJIAN

1. Ketua : Drs. Harun Kadir
2. Sekertaris : Drs. Bambang S. MS.
3. Penguji I : Drs. Baharuddin Batalipu
4. Penguji II : Dr. Edward L. Polinggomang, M.A.
5. pembimbing I : Drs. Daud Limbugau, S.U.
6. pembimbing II : Drs. Anwar Thosibo, M.Hum



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## A B S T R A K

"Partai Masyumi Cabang Sulawesi Selatan dan Perjuangannya 1950-1960".

Di lihat dari skala nasional bahwa keberadaan Partai Masyumi di Indonesia adalah merupakan keharusan sejarah dalam konteks sejarah kontemporer Indonesia. Demikian juga keberadaan Partai Masyumi Cabang Sulawesi Selatan adalah merupakan manifestasi atau perwujudan dari perjuangan Partai Masyumi dalam memperoleh dukungan mayoritas masyarakat di daerah Sulawesi Selatan guna memperkuat pengaruh dan kedudukan partai sehingga dapat mempermudah untuk mencapai tujuan partai.

Dalam perjalanan politik dan pemerintahan di Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer Partai Masyumi pernah memegang peranan penting, yaitu dengan munculnya Partai ini memegang tampuk pemerintahan pada awal-awal tahun 1950-an. Hal ini membuktikan bahwa Partai Masyumi cukup banyak memperoleh dukungan masyarakat, baik di daerah maupun di pusat.

Di lihat dari perkembangan Partai Masyumi sampai tanggal 1 Desember 1950 telah terdapat cabang-cabangnya di tiap Kabupaten bahkan di tiap Kecamatan dan desa di Jawa dan Madura. Demikian juga di luar Jawa seperti di Sulawesi Selatan telah terdapat cabang dan rantingnya sebanyak 53 cabang.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayat-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, yang merupakan prasyarat dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Fakultas Sastra dalam Jurusan Sejarah dan Arkeologi dengan konsentrasi Ilmu Kesejarahan. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. yang telah mengantarkan umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam ilmiah yang rasional guna untuk mengabdikan kepada jalan Ilahi Rabbi.

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa dalam penyajian tulisan ini yang berjudul "Partai Masyumi Cabang Sulawesi Selatan Dan Perjuangannya", telah banyak mendapatkan pelayanan dan bantuan yang berupa materil maupun moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu sewajarnya penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Tanteku ; H. Munatirah, yang penulis anggap sebagai Ibu kandung sendiri, atas segenap bimbingan, bantuan, dan pengertiannya yang dalam mengenai

pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, sehingga dalam kehidupannya yang sangat sederhana di desa mampu mengantarkan penulis memasuki perguruan tinggi sampai saat ini, dengan penuh jerih payah dan iringan doa restunya.

2. Kedua orang tuaku ; Ibunda Seha dan Ayahanda Abdul Majid, atas bimbingan serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi.
3. Bapak Drs. Daud Limbugau S.U. dan Bapak Drs. Anwar Thosibo M.Hum., sebagai Konsultan I dan Konsultan II, yang tak jemu-jemunya memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai.
4. Bapak Prof. DR. H. Basri Hasanuddin, M.A., Bapak DR. Ir. Radi A. Gany, Bapak Prof. DR. Ir. H. M. Natsir Nessa, M.S., Bapak dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D. selaku pimpinan universitas Hasanuddin yang telah membina universitas ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga memungkinkan terealisasinya Tri Darma Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Prof. DR. H. Nadjamuddin, M.Sc., Bapak Drs. Aminuddin Ram, M.Ed., Bapak Drs. Mustafa Makka, M.S. Bapak Drs. Arifin Usman, M.S. selaku pimpinan Fakul

tas Sastra yang telah membina fakultas ini sehingga memungkinkan terlaksananya kegiatan akademik se bagaimana layaknya.

6. Bapak Drs. Daud Limbugau S.U. selaku pimpinan Jurusan Sejarah dan Arkeologi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama mengikuti kegiatan akademik.
8. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga memungkinkan terlaksananya kegiatan akademik sebagaimana mestinya
9. Kepada teman-teman sesama mahasiswa yang senang tiasa memberikan imput kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini
10. Dan akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu dalam tulisan ini yang telah memberikan bantuan dan dorongan bagi penulis baik sewaktu masih di bangku pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian karya ilmiah ini

Mudah-mudahan atas segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

yang merupakan suluh penerang dalam menyongsong kehidupan yang abadi di sisinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran tulisan ini merupakan wujud dari karya seorang hamba Allah yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan sesuatu yang kurang sempurna pula, karena di dalamnya terbentang kemungkinan akan kesalahan dan kehilafan, justru itu sebagai pengantar tulisan ini perkenankanlah penulis memohonkan maaf sekiranya dijumpai kesalahan dan kehilafan serta dapat memberikan sumbang-pemikiran perbaikan tulisan ini; karena orang yang saling memaafkan dan saling mengoreksilah yang menghayati hakekat keberadaannya.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan memohon petunjuk-Nya, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi almamater, bangsa, dan Agama.

Wabillahi taufik walhidayah

Ujung Pandang Januari 1995

Penulis

## DAFTAR ISI

		HALAMAN
	Halaman Judul .....	1
	Pengesahan Pembimbing .....	ii
	Persetujuan Penguji .....	iii
	Abstrak .....	iv
	Kata Pengantar .....	vii
	Daftar Isi .....	xi
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Alasan Memilih Judul .....	1
	B. Masalah Dan Batasan Masalah .....	3
	C. Metodologi .....	5
BAB II	PARTAI MASYUMI DI SULAWESI SELATAN .....	11
	A. Eksistensi Masyumi Di Sulawesi Selatan ..	11
	B. Dasar Dan Orientasi Perjuangan .....	16
BAB III	STABILITAS POLITIK DAN KETERLIBATAN TOKOH- TOKOH MASYUMI DALAM PRRI/PERMESTA .....	23
	A. Stabilitas Politik Dan Pemerintahan Tingkat Nasional .....	23
	B. Stabilitas Politik Dan Pemerintahan Tingkat Regional Sulawesi Selatan .....	35
	C. Terlibatnya Tokoh-Tokoh Masyumi Dalam PRRI/Permesta .....	46
BAB IV	KEADAAN AKHIR PARTAI POLITIK MASYUMI ....	54
	A. Masyumi Menghadapi Batu Karang .....	54
	B. Keadaan Masyumi Pada Masa Demokrasi Terpimpin .....	67
	C. Masyumi Tersingkir Dari Arena Politik ...	74
BAB V	PENUTUP .....	87
	Kesimpulan .....	87
	Daftar Pustaka .....	92

BAB I  
PENDAHULUAN



A. Alasan Memilih Judul.

Kehidupan partai politik di tahun 1950-an dapat disebut sebagai masa Demokrasi Liberal. Masa itu merupakan masa yang benar-benar memberikan angin bagi tumbuhnya partai-partai politik. Masyumi merupakan salah satu partai politik yang tumbuh dan berkembang pada masa itu. Dilihat dari perkembangannya sampai tanggal 1 Desember 1950, telah terdapat cabang-cabangnya di tiap kabupaten, bahkan di tiap kecamatan dan desa di Jawa dan Madura. Demikian juga di luar Jawa termasuk di Sulawesi Selatan terdapat anak cabangnya sebanyak 53.<sup>1)</sup> Jumlah keseluruhan di Indonesia tercatat 237 cabang, 1080 anak cabang dan 4982 rantingnya, dan kurang lebih sepuluh juta anggotanya.<sup>2)</sup>

Pada masa itu Partai Masyumi mempunyai pengaruh yang sangat besar di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya. Dalam perjalanan politik dan pemerintahan pada tahun 1950-an, partai Masyumi memegang peranan penting di dalam menyelesaikan gejolak-gejolak politik yang terjadi di Sulawesi Selatan. Penulis ingin melihat sejauh mana keikutsertaan partai

1. Ruslikarim, Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah potret Pasang Surut, (Jakarta: CV. Raja Wali, 1983), hal. 70-71-

2. Ibid.

Masyumi di Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan gejala politik yang terjadi di daerah ini.

Gejolak-gejolak politik yang muncul di Sulawesi Selatan pada awal tahun 1950-an adalah masalah gerilya yang berlanjut menjadi suatu pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Di samping itu suasana pemerintahan di Sulawesi Selatan masih dalam proses peralihan dari pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) yang bersifat federal ke dalam pemerintahan republik yang berbentuk kesatuan.

Dalam menyelesaikan gejolak politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan, Partai Masyumi di daerah ini tidak bisa diabaikan peranannya, karena Partai Masyumi di Daerah ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan bahkan merupakan partai terbesar kedua setelah Partai Nasional Indonesia.

Melihat begitu besar pengaruh Partai Masyumi dalam keikutsertaannya menyelesaikan gejolak-gejolak politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu obyek penulisan dengan judul "Partai Masyumi Cabang Sulawesi Selatan dan Perjuangannya".

Tujuan pokok dari kajian ini adalah berusaha mendeskripsikan kembali realitas politik di Sulawesi Selatan yang tercermin dalam tingkah laku politik

prakti. Partai politik Islam Masyumi pada priode ini (1950-1960), suatu priode yang tidak bisa dianggap pendek dalam sejarah moderen Indonesia. Memang cukup penting bila perjuangan Partai Masyumi ditempatkan dalam suatu perspektif sejarah perjuangan partai Islam Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya.

B. Masalah Dan Batasan Masalah.

Dengan menyadari akan luasnya permasalahan yang mungkin terungkap dalam kaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam karya ini, maka dalam karya ini penulis mencoba mengarahkan fokus permasalahan berdasarkan rumusan pertanyaan; sejauh mana orientasi perjuangan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan di dalam pemerintahan di Sulawesi Selatan; kedua; sejauh mana peranan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan dalam keikut sertannya menyelesaikan gejolak politik yang terjadi di Sulawesi Selatan, ketiga; sejauh mana perjuangan partai ini di Sulawesi Selatan dalam hubungannya dengan konsep perjuangan Islam di dalam kehidupan politik dan pemerintahan, dan keempat; bagaimana dampak sosial politik dari akhir perjuangan Partai Masyumi di dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya.

Ruang lingkup pembahasan dalam karya ini yang menjadi obyek dan pusat perhatian penulis adalah menyangkut permasalahan pada perjuangan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan, baik menyangkut peranannya dalam menyelesaikan gejolak politik yang terjadi di Sulawesi Selatan maupun perjuangannya tentang Islam (umat Islam), di dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Perjuangan Masyumi itulah sebagai obyek formal dan material dalam tulisan ini, namun tidak tertutup kemungkinannya penulis mengungkapkan perjuangan Partai Masyumi secara keseluruhan sebagai landasan dan latar belakang perjuangan Masyumi cabang Sulawesi Selatan. Bagaimanapun juga kalau kita berbicara tentang suatu partai politik dalam hal ini perjuangan Partai politik Islam Masyumi serta dihubungkan tentang perjuangan umat Islam, maka jelas kita akan menemukan hubungan perjuangannya baik di pusat maupun di daerah.

Adapun batas temporal waktu yang menjadi pusat perhatian penulis adalah antara tahun 1950 sampai 1960. Penulis melihat batas waktu inilah yang paling baik untuk membicarakan perjuangan Partai Politik Masyumi di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan khususnya.

### C. Metodologi.

Perjuangan Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan adalah merupakan rangkaian perjuangan Partai Masyumi secara keseluruhan di Indonesia. Karena itu adanya keterkaitan perjuangan partai masyumi, maka penulis menguraikan perjuangan Partai Masyumi secara keseluruhan, kemudian mencoba mentranspormasikan ke dalam perjuangan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan.

Perjuangan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan telah melibatkan tokoh-tokoh politik Masyumi dan bahkan masyarakat pada umumnya. Untuk memahami dengan baik haruslah diperhatikan permasalahan-permasalahan politik di dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dalam membahas obyek kajian ini penulis berusaha memperhatikan ikatan struktural yang ada di pusat sebagai jaringan peran sosial politik yang saling berkaitan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaku-pelakunya di dalam kehidupan politik dan pemerintahan, sebagai bagian dari usaha memahami gejala-gejala sosial politik dalam kajian ini.

Menurut Taufik Abdullah bahwa sejarah sosial politik bersifat menyeluruh, secara praktis dalam pekerjaannya mestinya dibimbing oleh dua pokok; pertama, adalah batas yang jelas dari sasaran penelitian. Makin

pendek kerangka waktu makin mungkin bisa dikerjakannya dengan baik, makin teroatas lokalitas makin mungkin di selidikinya dari berbagai bentuk intraksi sosial politik yang menentukan corak dan dinamika sejarah; dan ke dua adalah jelasnya pertanyaan pokok yang diajukan.<sup>2)</sup>

Banyaknya faktor yang saling berkaitan satu sama lain dengan latar belakang perkembangan yang ada dalam kajian ini, maka dalam rangka pengerjaannya membutuhkan peralatan teknis yang selalu digunakan untuk menghasilkan karya sejarah yang bercorak deskriptif - analitis sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Untuk mengerti dan mencapai tataran tersebut, maka dalam kajian ini harus diketahui bagaimana keadaan politik dan pemerintahan, dan masalah yang berkaitan dengan masyarakat.

Dalam kajian tentang Perjuangan Partai Politik Masyumi Di sulawesi Selatan, yang mempunyai berbagai problematika sosial politik seperti halnya masalah peralihan pemerintahan, pertentangan kekuasaan, hirarki sosial politik dan lain-lain. Untuk memudahkan pengkajian ini dapat digunakan pendekatan sosial politik. Demikian juga tentang adanya problematika golongan-golongan politik yang berdasarkan kepentingan ideologi memerlukan pendekatan sosial politik.<sup>3)</sup>

Dalam Karya ini penulis menggunakan pendekatan teori sosial politik, sebagai landasan berpijak atau sebagai kerangka pikir dalam membahas kajian ini. Thomas P. Jenkinson dalam "The Study of Political Teori", membedakan dua macam teori politik satu diantaranya adalah teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (Norms For Political Behavior). Karena mengandung nilai-nilai dan norma-norma sehingga disebutnya sebagai "Valuation", (yang mengandung nilai). Lanjut Thomas mengatakan bahwa teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik atau dengan perkataan lain bahwa teori politik adalah bahasan dan renungan atas; tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan akibat yang ditimbulkan oleh tujuan politik itu.<sup>4)</sup>

Sehubungan dengan teori di atas, maka dalam tulisan ini mencoba menemukan gejala-gejala politik yang bersifat moral. Semua fenomena politik ditapsirkan dalam rangka tujuan moral dan dianggap bahwa dalam kehi-

2. Taufik Abdullah, (ed), Sejarah Lokal di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1990, hal. 320.

3. Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hal. v.

4. Lihat Edward J. Poelinggomang, "Pembahasan Fakta dan Penelitian Dalam Kajian Sejarah", Makalah, Dalam Seminar Bulan Bahasa dan Hut XXVIII, Fak. Sastra Unhas, (Ujung Pandang, Fak. Sastra Unhas), 24 Okt. 1992, hal. 5.

dupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan ini. Teori semacam ini mencoba mengatur hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu fihak memberikan kepuasan, dan di fihak lain dapat membimbingnya menuju kesuatu struktur masyarakat politik yang stabil dan dinamis. Untuk itu Partai Politik harus memperjuangkan tujuan yang bersifat moral, dan atas dasar itu pula menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik, sehingga dapat mencapai suatu tujuan yaitu mendidik warga masyarakat mengenai norma-norma dan nilai-nilai itu.<sup>5)</sup>

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik secara spontan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu fihak dan pemerintah di lain fihak.<sup>6)</sup> Partai Politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah moderen atau yang sedang dalam proses modernisasi.

5. Prop. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hal. 30.

6. Ibid. hal. 31.

Penulisan sejarah yang ilmiah, dituntut untuk menghasilkan karya yang deskriptif-analitis. Dalam hal ini maka rekonstruksi sejarah memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sebuah karya sejarah. Sebagai langkah yang paling awal dilakukan penulis adalah kegiatan mencari, mengetahui dan mengumpulkan atau heuristik. Selanjutnya diadakan pengujian terhadap sumber-sumber tersebut agar kredibilitas sumber-sumber yang ada dapat diketahui. Untuk itu diperlukan adanya kritik, baik ekstern (asal usulnya), maupun intern (isi dari sumber-sumber itu), setelah melalui dua tahap di atas, maka selanjutnya adalah interpretasi atau perumusan fakta yang ada dan kemudian diadakan sintesa untuk menghasilkan kisah sejarah.

Sehubungan dengan uraian di atas maka dapatlah diketahui dalam tulisan ini mengkaji perjuangan Masyumi yang dilatar belakangi oleh adanya fenomena-fenomena sosial politik. Sebagai suatu perjuangan yang diawali oleh adanya gejolak politik yang terjadi pada tahun 1950-an yang melahirkan ketidak stabilan politik di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan khususnya. Sehubungan dengan itu Neil Smelser yang dikutip oleh Anhar Gonggong mengatakan bahwa yang mendorong munculnya gejolak politik disebabkan oleh adanya;

"(1) Yang bersifat orientasi norma melahirkan pergerakan reform dan counter reform  
(2) Yang berorientasi nilai melahirkan revolusi politik, pergerakan nasional, pemberontakan menentang Undang-Undang Dasar Negara dan lain-lain.<sup>7)</sup>

Sehubungan dengan di atas, maka perjuangan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan adalah mengenai nilai-nilai moral agama Islam sehingga tercipta suatu masyarakat yang bercorak Islam. Agar karya ini tersusun secara sistematis, maka uraiannya di bagi ke dalam lima bab yaitu; bab pertama; pendahuluan, yang menguraikan alasan memilih judul, masalah dan batasan masalah, dan metodologi., bab kedua; Partai Masyumi di Sulawesi Selatan, yang menguraikan eksistensi Partai Masyumi dan dasar dan orientasi perjuangannya., bab ketiga; stabilitas politik dan keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam PRRI/Permesta, yang menguraikan stabilitas politik tingkat nasional dan tingkat daerah Sulawesi Selatan yang diakhiri dengan keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam PRRI/Permesta., bab keempat; keadaan akhir partai politik Masyumi, yang menguraikan masyumi menghadapi batu karang, keadaan Partai Masyumi pada masa Demokrasi terpimpin, yang diakhiri dengan tersingkirnya Partai Masyumi di arena politik., dan bab kelima; penutup, yang menguraikan kesimpulan-

Anhar Gonggong, Abdul Cahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hal.12.



## BAB II

### PARTAI MASYUMI DI SULAWESI SELATAN

#### A. Eksistensi Partai Masyumi Di Sulawesi Selatan.

Keberadaan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan, sebagai suatu partai politik yang bercorak Islam, bukanlah merupakan suatu kebetulan dalam sejarah yang tidak dilatar belakangi oleh suatu kesadaran yang dalam dan panjang. Partai Masyumi yang dibentuk cabangnya di Sulawesi Selatan dapat dikatakan sebagai suatu keherusan sejarah bagi perjalanan politik umat Islam di daerah ini.

Sebelum Indonesia merdeka, di Sulawesi Selatan sudah ada partai Islam yang bergerak dalam bidang politik yaitu Partai Serikat Islam Indonesia yang didirikan pada tahun 1918 di Makassar, demikian juga Muhammadiyah didirikan sejak 1930, sebagai suatu organisasi Islam yang bergerak dalam bidang sosial. Kota Makassar dan Pare-pare merupakan pusat kegiatan sebelum Jepang datang.<sup>1)</sup>

Jadi jauh sebelum Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan didirikan, umat Islam Sulawesi Selatan sudah mengenal organisasi atau partai politik Islam yang dijadikan sebagai wahana perjuangan.

---

1. Syarita Paweloy, Arus Revolusi di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Prop. Sul-Sel. Masa Rakti 1985-1989, 1978), hal.31

Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 12 Desember 1949, yang diketuai oleh M. Nur.<sup>2)</sup> Partai ini muncul pada saat-saat keresahan politik di daerah ini untuk kembali ke negara kesatuan republik Indonesia.<sup>3)</sup>

Partai Masyumi yang baru muncul di daerah ini telah disambut baik oleh masyarakat Sulawesi Selatan, karena memang partai ini sangat mengakar dengan penduduk Sulawesi Selatan yang mayoritas Islam, di samping partai Masyumi telah memperlihatkan ketangguhannya dalam memperjuangkan Islam, baik sebelum Indonesia merdeka maupun pada saat revolusi fisik. Oleh karena itu bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas muslim itu dalam waktu singkat telah banyak mendapat dukungan partai Masyumi. Hal ini dapat dilihat pada hasil pemilihan umum di daerah ini.<sup>4)</sup>

Partai Masyumi sebagai mana konsep perjuangan yang menjadi tujuan awal didirikannya partai ini di Indonesia sebagai suatu partai politik Islam satu-satunya di dalam memperjuangkan aspirasi politik umat Islam, sebagai satu-satunya wahana perjuangan politik umat Islam Indonesia.

---

2. Kementrian Penerangan Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi, 1953, hal. 387.

3. Syarita Paweloy. op. cit. hal. 372.

4. Barbara Sillars Harvey, Permesta: Perjuangan Setengah Hati, (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), hal. 41.

sesuai dengan hasil kongresnya yang pertama bahwa satu-satunya partai politik Islam di Indonesia; bahwa Partai Masyumi adalah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia.<sup>5)</sup>

Di dalam kongres itu pula dicetuskan tujuan Partai Masyumi yaitu; menegakkan kedaulatan negara dan Agama Islam, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.<sup>6)</sup> Dalam usahanya untuk mencapai tujuan itu terlihat di dalam anggaran dasarnya pada pasal tiga yaitu menginsapkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik; menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam untuk perjuangan mempertahankan agama dan kedaulatan negara; melaksanakan kehidupan rakyat berdasarkan iman dan takwa, prikemusiaan, sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran Islam; bekerja bersama-sama dengan lain-lain golongan dalam lapangan perjuangan menegakkan kedaulatan negara;<sup>7)</sup> menambah tersebarnya ideologi Islam dikalangan masyarakat Indonesia dengan tidak menghalangi pihak-pihak lain yang sejalan memperkokoh sendi ke-Tuhanan yang Maha Esa; Membentengi jiwa umat Islam dari infiltrasi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan tekad fi Sabilillah.<sup>8)</sup>

5. Syafii Maarif, Islam Dan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga, 1988), hal. 31.

6. Ruslikarim, op. cit. hal. 68.

7. ibid.

Berdasarkan hasil kongres Partai Masyumi di atas, yang merupakan dasar perjuangan Partai, maka jelas bahwa semua cabang dari partai Masyumi ini harus merujuk kepada konsep dasar perjuangan itu. Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan akan memperjuangkan tujuan yang akan dicapai oleh partai, khususnya di daerah Sulawesi Selatan ini.

Keberadaan Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan telah mendapat dukungan banyak dari para ulama-ulama, maupun dari organisasi Muhammadiyah di daerah Sulawesi Selatan ini. Sebagai suatu partai yang bercorak Islam, dan akan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam khususnya di Sulawesi Selatan di dalam kehidupan politik dan pemerintahan, maka masyumi telah disambut dengan baik di daerah ini.

Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan memang telah memperlihatkan peranannya dalam usahanya ikut serta menyelesaikan gejolak-gejolak politik maupun dalam proses peralihan pemerintahan di daerah Sulawesi Selatan ini.<sup>9)</sup> Sekalipun Partai Masyumi Cabang Sulawesi Selatan belum seberapa lama didirikan di daerah ini, akan tetapi partai ini cukup mengakar pada masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas beragama Islam.

<sup>8</sup>. Syafii Maarif, op. cit. hal. 72.

<sup>9</sup>. Soebagijo, I.<sup>N</sup>. Sudoro Pejuang Tanpa Henti, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hal. 299-230.

Dari sisi lain, kegiatan Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan, terutama dalam hubungannya dengan kegiatan politik nasional dalam menghadapi pemilihan umum untuk parlemen dan badan Konstituante, maka Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan telah melaksanakan kampanye demi meluaskan pengaruhnya sampai ke pelosok pedesaan Sulawesi Selatan.

Kampanye yang dilakukan Partai Masyumi di daerah-daerah pedesaan, di samping untuk memperoleh dukungan politik dalam pemilihan umum, maupun untuk membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia yang sudah sejak lama ada di daerah ini. Kenyataan telah memperlihatkan pada masa revolusi fisik di mana Partai Komunis Indonesia telah melakukan pemberontakannya yang pertama di Madiun pada tahun 1948, menunjukkan betapa besar pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam menggerakkan massa.<sup>10)</sup>

Oleh karena hal semacam itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan, maka partai Masyumi yang ada di daerah ini cukup memberikan andilnya di dalam membendung pengaruh PKI. Hal ini memang dapat dibuktikan oleh Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan pada pemilihan umum tahun 1955 di daerah Sulawesi Selatan ini.<sup>11)</sup>

<sup>10</sup>. Ruslikarim, op. cit. hal. 133-134.

<sup>11</sup>. Barbera Sillars Harvey, Permesta, op. cit. hal. 39-40.

B. Dasar Dan Orientasi Perjuangan.

Kalau ada kelompok yang paling merasakan rahmat kemerdekaan di Indonesia, maka kelompok itu ialah umat Islam yang menjadi penghuni mayoritas nusantara ini. Kemerdekaan bagi umat Islam adalah salah satu esensi ajaran Islam sebagai pancaran tauhid, yaitu suatu paham monolitis yang amat sejati. Begitu luhurnya nilai kemerdekaan bagi umat Islam, maka bila ada pihak yang ingin mengganggu kemerdekaan bangsa dan negaranya, maka umat Islam akan tampil kedepan untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi kemerdekaan itu. Perang mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945-1949 menunjukkan betapa umat Islam Indonesia bersama golongan lain maju kedepan perang menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah. Begitu tingginya kemerdekaan itu sehingga sangat tepat di tempatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pfi keadilan.

Dengan segala kemampuannya umat Islam Indonesia pada awal-awal setelah kemerdekaan, mencoba merumuskan corak masyarakat dan cita-cita politik yang hendak mereka ciptakan dalam rangka mengisih kemerdekaan yang telah mereka bayar dengan harga yang sangat

mahal itu. Bila dihubungkan dengan konsep perjuangan Partai Masyumi, maka di dalam mengisi kemerdekaan ini haruslah sejalan dengan konsep ajaran sari'ah Islam, sebagai landasan pokok perjuangan Partai Masyumi.

Konsep Islam menggambarkan suatu masyarakat beriman yang bercorak universal. Bahwa setiap muslim yang sadar merasakan benar bahwa ia adalah anggota ummat itu. Identitasnya sebagai muslim banyak ditentukan oleh keterikatan spiritualnya dengan persaudaraan yang universal itu. Secara teori, bahwa ummat Islam percaya kepada ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Maka dari sudut pandangan inilah cita-cita kekuasaan politik Partai Masyumi menyatu dengan wawasan moral sebagai pancaran nilai ajaran Islam. Jadi dengan demikian politik tidak bisa dipisahkan dari ajaran yang bersumber dari wahyu.

Jika konsep teoritis di atas kita bawa ke dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas Islam itu, maka akan dihadapkan kepada dua fenomena sosiologis yang tidak saja berbeda, akan tetapi bisa jadi bertentangan. Ummat yang menjadi pendukung partai dengan label Islam atau label lain yang menunjuk kepada makna yang sama, yaitu menerima konsep teoritis tentang ajaran Islam secara penuh. Fenomena lain adalah kelompok ummat Islam, mungkin karena pengaruh politik barat,

yang berpandangan bahwa kegiatan politik adalah semata-mata kegiatan duniawi, sedangkan agama adalah persoalan pribadi yang tidak perlu dikaitkan dengan masalah politik. Dua pandangan ini sama-sama mempengaruhi perjalanan sejarah kontemporer Indonesia, sekalipun sikap kompromi antara kedua pandangan itu di dalam bidang politik akan tetapi bila dihubungkan dengan esensi ajaran Islam, maka kedua pandangan itu bertentangan.

Mereka yang dimasukkan ke dalam kategori pertama umumnya dikatakan sebagai kelompok ummat yang percaya ke pada ajaran Islam sebagai suatu pandangan hidup yang lengkap dan sempurna. Bagi mereka tidak ada kegiatan hidup, betapapun kecilnya yang lepas dari sorotan Islam. Sebaliknya mereka yang dimasukkan dalam kategori kedua menurut gambaran yang diberikan oleh Daliar Noer adalah mereka yang tidak menghiraukan sangat praktek keagamaan dan membatasinya pada hal-hal yang berkaitan dengan tahap-tahap yang terpenting dalam kehidupan.<sup>12</sup> Golongan ini dikenal dengan sebutan nasionalisme sekuler, atau di singkat golongan nasionalis.

---

12. Daliar Noer. *The Modernist Muslim Movement In Indonesia, 1900-1942*, (Singapura-Kualalumpur: Oxford University Press, 1973), hal. 13.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa konsep ummat Islam selalu dikaitkan dengan pelaksanaan sari'ah, oleh sarjana-sarjan Islam mendefinisikan, yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak satupun dari dimensi kegiatan manusia yang lepas dari tilikan sari'ah. Sari'ah yang dimaksud di sini adalah agama Islam itu sendiri. Sehubungan dengan itu Saltut dalam bukunya "Al Islam Aqidah wa Sari'ah" mengatakan bahwa sari'ah adalah sistem-sistem yang Tuhan telah tetapkan atau menetapkan prinsip-prinsip dasarnya agar dengan itu manusia punya pegangan kokoh dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama muslim, dengan manusia lain, dengan alam semesta, dan dengan kehidupan ini.<sup>13)</sup>

Definisi Saltut di atas sebenarnya sangat dekat dengan hakekat sari'ah Islam itu yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Definisi lain yang tidak banyak berbeda dengan definisi Saltut, diberikan oleh Muhammad Natsir bahwa Sari'ah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bahwa sari'ah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang beragama.<sup>14)</sup>

<sup>13</sup> . Mahmud Syaltut, Al Islam Aqidah Wa Sari'ah, (Kairo: Dar al Qalam, 1966), hal. 12.

<sup>14</sup> . Dikutip oleh Daliar Noer, op. cit. hal. 1.

Pemimpin-pemimpin Partai Masyumi haruslah menjalankan sistem politik yang sejalan dengan konsepsi ajaran Islam yang menjadi dasar prinsip-prinsip ideologisnya. Sehubungan dengan itu Maududi menyatakan bahwa sari'ah dapat berfungsi bila seluruh sistem kehidupan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan bukan sebaliknya.<sup>15)</sup>

Pemimpin-pemimpin Partai Masyumi pada waktu itu tampaknya telah punya persepsi yang sama tentang sari'ah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh sarjana-sarjana muslim di atas. Karena itu, sebagai muara logis dari pandangan pemimpin-pemimpin Partai Masyumi, bahwa tanpa kekuasaan politik di tangan mereka tidak mungkin akan menjadi bagian suatu sistem hukum Islam untuk berfungsi secara wajar dalam masyarakat yang mayoritas Islam. Didorong oleh alasan inilah, maka Partai Masyumi mencoba memperjuangkan ideologi Islam untuk mencapai tujuannya, sekalipun dengan hasil yang sangat terbatas.

Dengan tampilnya Partai Masyumi sebagai suatu Partai Islam yang sangat berpengaruh pada waktu itu telah berjuang untuk mewujudkan cita-cita ummat Islam Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan khususnya.

---

15. ibid. hal. 50

Partai Masyumi yang dibentuk pada tahun 1959 di Sulawesi Selatan ini adalah merupakan wahana politik umat Islam di daerah ini. Jika dilihat dari data sosiologis dari pendukung utama didirikannya Partai Masyumi ialah organisasi Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama, dua organisasi Islam yang sangat berpengaruh di daerah ini.

Pada priode ini partai politik Masyumi telah menghususkan perjuangannya dibidang politik dalam rangka menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia merdeka. Partai Masyumi merupakan satu-satunya partai politik Islam yang tampil sebagai pembela demokrasi yang paling gigih pada masa demokrasi parlementer, khususnya di Sulawesi Selatan .

Sehubungan dengan itu telah ditegaskan oleh Partai Masyumi dalam kongresnya yang pertama pada bulan Nopember 1945, bahwa partai Masyumi adalah satu satunya partai politik Islam di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Keputusan tersebut adalah merupakan suatu ikrar, dan eksistensi partai Islam yang lain tidak diakui lagi. <sup>16)</sup>

---

16. Pimpinan Wilayah Masyumi Jawa Timur, Hari Plang Tahun Partai Masyumi Ke XI, (Surabaya: Pimpinan Wilayah Masyumi Jawa Timur, 1956), hal. 27.

Memang tidak dapat disangkal lagi bahwa Partai Masyumi telah membela dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu pluralisme sosial dan budaya yang secara kuantitatif umat Islam merupakan mayoritas mutlak dari penduduk daerah Sulawesi Selatan. Partai Masyumi telah merumuskan tujuan jangka panjang yang akan diraihnya dalam perjuangan politik sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya Pada pasal tiga yaitu; menginsafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan khususnya, dalam perjuangan politik; menyusun dan memperkokoh umat Islam untuk perjuangan mempertahankan agama dan kedaulatan negara, melaksanakan kehidupan rakyat berdasarkan iman dan takwa, pri kemanusiaan, sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran Islam; bekerja bersama-sama dengan lain golongan dalam lapangan perjuangan menegakkan kedaulatan negara.<sup>17)</sup>

Sehubungan dengan di atas maka tujuan yang akan diraih oleh Partai ini adalah; menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam; melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan, dan terlaksananya ajaran Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara khususnya di Sulawesi Selatan menuju keredhaan Ilahi!<sup>18)</sup>

17. Ruslkarim. op. cit. hal. 68.

18. Syafii Maarif., op. cit. hal. 32.

BAB III

STABILITAS POLITIK DAN KETERLIBATAN

TOKOH-TOKOH MASYUMI DALAM PRRI/PERMESTA

A. Stabilitas Politik Dan Pemerintahan Tingkat Nasional

Kehidupan politik dan pemerintahan pada 1950-an, yang biasa disebut sebagai priode Demokrasi Liberal. Di negara kita pada masa itu termasuk salah satu masa di mana ditemukan iklim yang benar-benar memberikan angin bagi tumbuhnya partai-partai politik. Dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer, peranan partai politik cukup penting dalam menentukan jalannya pemerintahan negara.

Priode itu merupakan kelanjutan perjuangan yang telah dicapai sebelumnya, oleh Herbert Feith disebutnya sebagai masa meraba-raba, mengarungi lautan yang tak dikenal, mencari doktrin, kebijaksanaan-kebijaksanaan serta metode-metode pemerintahan yang cocok dengan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>1)</sup>

Setelah kembali kenegara kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, atas kemenangan golongan unitaris terhadap golongan federalis, maka negara kita memperlihatkan sistem wulty partai. Demokrasi masih dalam proses pertumbuhan mencari bentuk yang sesuai dengan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.

<sup>1</sup>. Ruslikarim, op.cit. hal. 107.

Sistem pemerintahan yang cocok dengan kepribadian yakni suatu sistem pemerintahan dimana ada hak dan kewajiban untuk mengatakan dan menyalurkan kehendak rakyat, untuk mencapai cita-cita dalam bidang kenegaraan dan kemasyarakatan. Sistem tersebut harus ditumbuhkan oleh elemen-elemen spesifik Indonesia, yaitu elemen sejarah dan elemen cita-cita bangsa Indonesia. Roeslam Abdulgani mengatakan bahwa kepribadian bangsa Indonesia tidaklah statis, tetapi dinamis. Tidak bisa disangkal, bahwa kita mengenal parlemen dan partai itu adalah dari tradisi barat cuma saja dalam pengalaman Indonesia, masalah kepartaian sudah ada sejak masa pergerakan.<sup>2)</sup>

Dalam perjalanan politik dan pemerintahan Indonesia pada tahun 1950-an, tidak terlepas pada permasalahan bagaimana mengatur dan membangun negara, dan yang lebih utama pada waktu itu adalah mengenai dasar negara yang mana akan diterapkan. Ada tiga konsep ideologi yang muncul pada masa itu, dimana masing-masing penganutnya berusaha memperjuangkannya untuk dijadikan sebagai dasar negara. Kahar Muzakkar membagi dari ketiga aliran ideologi itu; liberalisme komunisme, nasionalisme, dan agama.<sup>3)</sup> Sedang Masyumi melihat dan mengelompokkan ketiga aliran

2. Ibid. hal. 110

3. Ibid. hal. 111.



itu ialah; marxisme/komunisme, nasionalisme, dan agama. Deri ketiga kelompok aliran ideologi yang ada pada waktu itu, masing memperjuangkan ideologinya untuk dijadikan sebagai dasar negara, sehingga menimbulkan perselisihan-perselisihan,<sup>5)</sup> menyebabkan ketidak stabilan politik. Alfian mengatakan bahwa mudahnya pertikaian dan perpecahan adalah merupakan manifestasi dari kemajemukan dan merupakan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia dalam jaman pergerakan nasional, dimana selalu terjadi pertikaian, namun masih dapat dicarikan jalan keluarnya dan tidak sampai kepada kompromisasi atau bentrokan fisik yang membahayakan pergerakan nasional.<sup>6)</sup>

Partai-partai politik pada masa pergerakan nasional adalah merupakan sarana dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang majemuk itu, untuk berjuang mencapai kemerdekaan, sekalipun berbeda bentuk perjuangannya akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu kemerdekaan.

Berbeda dengan orientasi perjuangan partai politik setelah kemerdekaan. Partai-partai politik memperlihatkan identitasnya sebagai suatu bentuk dasar yang akan diperjuangkan dalam mengisih dan mengatur negara dan bangsa yang sudah merdeka ini. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan-perbedaan mendasar diantara beberapa

4. Ibid. hal. 108

5. Ibid.

6. Ibid. hal. 112-113.

partai mengenai bentuk dasar apa yang akan dijadikan untuk mengatur dan mengisi kemerdekaan. Perbedaan-perbedaan ini mengakibatkan komplik-komplik yang tidak bisa dihindarkan, terutama di parlemen dan di dalam badan konstituante. Tugas badan konstituante untuk menetapkan dasar negara ternyata tidak pernah membuahkan hasil. Hal ini disebabkan oleh sulitnya untuk memperoleh suatu konsensus mengenai dasar negara sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Sehubungan dengan itu oleh Kahar Muzakkar menyebutkan adanya dua faktor yang menjadi penyebab ketidakstabilan politik dan melahirkan perang saudara; pertama adalah karena tidak adanya dasar negara yang kuat dan tegas, dan kedua, karena tidak adanya sistem pemerintahan yang tepat.<sup>7)</sup> Faktor pertama dapat dilihat pada peristiwa Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1946 yang dimotori oleh Tan Malaka, dan peristiwa Madiun pada tahun 1948 oleh Muso. Faktor kedua ialah terjadinya perpecahan antara Soekarno dan Hatta, pengambil alihan pimpinan pemerintahan daerah Sumatra Timur dari tangan Gubernur Ruslam Muljohardjo oleh Achmad Husain pada 20 Desember 1956, pengambil alihan pimpinan wilayah

---

<sup>7)</sup> Ibid. hal. 112. Lihat juga Abd Kahar Muzakkar, Konsep Negara Demokrasi Indonesia, (tanpa kota), Hasanuddin (tanpa tahun), hal. 21-23.

teritorium I oleh Simbolon pada 22 Desember 1956, dan proklamasi Permesta oleh Vantje Samual pada 2 Maret 1957 di Makassar.<sup>8)</sup>

Kembali kepada peranan Partai Masyumi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Sejak kembali kenegara kesatuan republik Indonesia, di bawah payung UUDS 1950. Menurut UUDS 1950 ini bahwa hidup matinya pemerintahan ditentukan oleh besar kecilnya dukungan kabinet yang diperoleh di dalam parlemen. Kedudukan presiden menurut UUDS 1950 adalah hanya sebagai kepala negara dan bukan kepala pemerintahan, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri.<sup>9)</sup>

Atas jasa Muh. Natsir, seorang tokoh utama Partai Masyumi (Ketua Umum), memajukan mosi integral ke dalam parlemen untuk kembali ke negara kesatuan. Atas dasar itulah sehingga Presiden Soekarno menunjuk Natsir sebagai formatur kabinet dan sekaligus sebagai Perdana Menteri. Selain alasan tersebut di atas, memang juga Partai Masyumi pada masa itu merupakan partai terbesar. Partai Masyumi untuk pertama kali memainkan kartu politik di dalam pemerintahan.

---

8. Ibid.

9. A. Syafii Maarif, Islam Dan Politik Di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1988), hal. 38.

Kabinet Natsir mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 6 September 1950.<sup>10)</sup> Dilihat dari komposisinya para mentrinya terdiri dari orang-orang yang masuk dalam kelompok administrator. Kabinet ini banyak mendapat kritikan, baik dari PNI sebagai oposisi maupun dari kelompok Sukiman (tokoh-tokoh Masyumi saingan politik Natsir). Natsir membela kabinetnya dengan menyatakan bahwa kabinet yang dibentuk itu bersifat peralihan dan merupakan kabinet kerja yang akan berakhir setelah pemilihan umum diselenggarakan pada tahun 1951.<sup>11)</sup>

Kabinet Natsir menyusun programnya yang terdiri dari tujuh pasal yang intinya adalah; (1) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dalam waktu singkat; (2) Memajukan prekonomian, kesehatan dan kecerdasan rakyat; (3) Menyempurnakan organisasi pemerintah dan militer; (4) Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat dalam tahun 1951; dan, (5) Memulihkan keamanan dan ketertiban.<sup>12)</sup>

Dalam menjalankan programnya, kabinet Natsir mendapat kritikan dari kelompok Sartono (PNI, pihak oposisi), serta dari pihak Presiden Soekarno sendiri. Rintangan

---

10. P.K. Poerwantana, Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hal.43.

11. Ibid.

12. Ibid. hal. 44.

yang pertama telah datang dari parlemen (kelompok Sartono), ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat tentang pajak penghasilan perusahaan, meskipun undang-undang itu dapat mengurangi defisit anggaran belanja negara, akan tetapi dari pihak parlemen menganggap bahwa dengan undang-undang itu akan menakutkan para penganam modal asing untuk mendirikan usaha di Indonesia. Selanjutnya parlemen menuduh pemerintah meremehkan parlemen, dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya, di samping itu pemerintah dituduh juga menjalankan politik pemerintahan kolonial.<sup>13)</sup>

Pada sisi lain pemerintah menghadapi Presiden Soekarno, yang semula mendukung sepenuhnya. Perselisihan ini menyangkut masalah Irian Barat. Menurut Perdana Menteri Natsir bahwa masalah pengembalian Irian Barat, kita jalankan politik lunak dengan mengharapkan bantuan internasional terutama Amerika Serikat. Sikap kabinet ini mencerminkan golongan administrator yang berlawanan dengan sikap Presiden Soekarno. Muh. Yamin, pendukung Soekarno menyatakan bahwa cara yang harus dilakukan untuk mengembalikan Irian Barat adalah dengan revolusioner seperti yang dilakukan dalam revolusi dahulu.<sup>13b)</sup>

---

<sup>13.</sup> Ibid.

<sup>13b.</sup> Ibid. hal. 47.

Perbedaan sikap politik pemerintah dengan sikap politik presiden menyebabkan semakin dekatnya Presiden Soekarno dengan pihak oposisi (PNI). Sebenarnya menurut sistem yang berlaku pada saat itu, presiden harus bernada sama dengan pemerintah, namun sebaliknya yang terjadi. Hal ini disebabkan jiwa revolusioner serta prestise Soekarno menghendaki pemerintah harus tunduk kepadanya. <sup>14)</sup>

Tantangan serta kritikan yang datang itu menyebabkan kabinet Natsir jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 21 Maret 1951. Ada dua hal yang perlu kita ingat dalam masa kabinet Natsir; pertama, prekonomian negara cukup lumayan, karena pada waktu itu terjadi perang korea sehingga hasil produksi Indonesia terutama karet mendapat pasaran. Kedua adalah hubungan pemerintah (kabinet Natsir) dengan pimpinan militer pada saat itu cukup baik, karena Simatupang yang menjabat sebagai Komandan Strategi Angkatan Perang (KSAP), dan Nasution yang menjabat sebagai Komandan Strategi Angkatan Darat (KSAD) termasuk dalam golongan administrator. <sup>15)</sup>

<sup>14.</sup> PK. Poerwantana. Partai Politik Di Indonesia. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 45.

<sup>15.</sup> Ibid. hal. 46.

Setelah Kabinet Natsir jatuh, maka Presiden Soekarno menunjuk Sukiman Wiryoosejyo menjadi Perdana Menteri pada bulan maret 1951. Dalam menjalankan program nya, Kabinet Sukimen (Masyumi) lebih memfokuskan perhatiannya pada masalah pemulihan keamanan. Yang menarik untuk ditelusuri adalah usahanya dalam menyingkirkan lawan-lawan politiknya terutama PKI, karena Masyumi melihat bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah melakukan pemberontakan pada tahun 1948. Di samping itu PKI sering melakukan kerusuhan-kerusuhan diberbagai daerah. Pemerintah melakukan penangkapan terhadap gembong-gembong PKI. 16a)

PKI menjadi marah terhadap Masyumi, terutama karena bersedianya PNI bergabung dalam koalisi pada kabinet Sukiman. Pada bulan Agustus 1951 terjadi pemogokan oleh kesatuan Seluruh Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), oleh pemerintah bahwa PKI-lah yang mendalaminya. Aidit selaku pimpinan PKI mencoba membantah tuduhan pemerintah, namun sia-sia saja. Kerusuhan-kerusuhan lain yang dilakukan PKI seperti yang terjadi di Bogor dengan menyerang pos polisi. 16b)

---

16a. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1991. 365  
16b. Ibid.

Pada tanggal 11 Agustus 1951 pemerintah, dalam hal ini kabinet Sukiman (dari Partai Masyumi), yang menggantikan kabinet Natsir, melakukan penangkapan terhadap para tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia. Penangkapan besar-besaran itu termasuk 16 anggota parlemen (ayah Aidit sendiri yang pada saat itu menjadi anggota parlemen dari sebuah partai kecil). Sampai pada bulan Oktober 1951, pemerintah menyebutkan jumlah anggota PKI yang ditangkap sekita 15.000 orang, sampai mereka dibebaskan semua setelah kabinet Sukiman jatuh dan digantikan Kabinet Wilopo dari (PNI).

Setelah Kabinet Wilopo (PNI), jatuh pada pertengahan tahun 1953, maka yang menggantikan adalah Kabinet Ali Sastroamojoyo pada 3 Juli 1953. Dalam Kabinet Ali (juga dari PNI), Partai Masyumi berada pada pihak oposisi. Namun setelah Kabinet Ali yang pertama ini jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada presiden, maka yang menggantikan adalah Kabinet Burhanuddin Harahap (dari Partai Masyumi).

Pada Kabinet yang dipimpin oleh Partai Masyumi ini berusaha membujuk PNI untuk bekerja sama, namun mereka gagal sehingga dalam kabinet ini tidak terdapat wakil dari PNI. Dalam hal ini wakil Presiden Muh. Hatta menegaskan agar kabinet inimenitik beratkan perhatiannya pada pemulihan kewibawaan dan kepercayaan kepada rakyat dan tentara, serta melaksanakan

Pemilihan Umum sebagaimana yang telah direncanakan.<sup>17)</sup> Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengadakan pemilihan umum yang pertama pada 29 September 1955 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan anggota badan konstituante pada 15 Desember 1955, berdasarkan undang-undang nomor 7 tanggal 7 April 1955.<sup>18)</sup>

Permasalahan lain yang dapat diatasi oleh Kabinet Burhanuddin Harahap adalah pengisian jabatan KSAD yang kosong karena Bambang Utoyo mengundurkan diri, dan menetapkan Nasution menjadi KSAD kembali setelah di non aktifkan sejak tahun 1952 setelah kejadian peristiwa 17 Oktober 1952.<sup>19)</sup>

Kita dapat melihat pada priode antara 1950-1955 Partai Masyumi telah memainkan peranannya di dalam memperjuangkan cita-cita ummat Islam dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hanya saja peluang waktu yang digunakan sangat pendek sehingga partai ini belum dapat mewujudkan cita-cita partainya yaitu menciptakan suatu masyarakat yang bercorak Islam sesuai dengan konsep sari'ah.

Perimbangan suara setelah pemilu menunjukkan bahwa Partai Masyumi masi kuat, sekalipun partai ini

---

17. Poerwantana. op. cit. hal. 50.

18. Ibid.

19. W.C. Ricklefs, op.cit. hal.368.

sudah kehilangan satu sayapnya yaitu dengan keluarnya unsur Nahdatul Ulama dari Masyumi dan membentuk sendiri satu partai. Partai Masyumi masih berada pada posisi kedua setelah PNI, baik di DPR maupun di dalam badan Konstituante. Untuk jelasnya kita lihat; PNI memperoleh suara yang sah 8.454.653 (22,3%), 57 kursi (22,2%); Masyumi 7.903.886 (20,9%), 57 kursi (22,2%); NU 6.955.141 (18,4%), 45 kursi (17,5%); PKI 6.176.914 (16,4%), 39 kursi (15,2%); PSII 1.091.160 (2,9%), 8 kursi (3,1%); Parkindo 1.003.352 (2,6%), 8 kursi (3,1%); Partai Katolik 770.740 (2,0%), 6 kursi (2,3%); PPSI 753.191 (2,0%), 5 kursi (1,9%); Murba 199.588 (0,5%), 2 kursi (0,8%); lain-lain 4.496.701 (12,0%), 30 kursi (11,7%).<sup>20)</sup>

Setelah pemilihan umum 1955, kedudukan partai politik, khususnya Masyumi mulai berkurang dalam perancangan politik nasional, sekalipun masalah ideologi tidak lagi dipermasalahkan secara terang-terangan, namun intensitasnya kompliknya tidak berkurang. Selama masa 1956-1958, pemerintahan sipil mendapat tantangan dari tiga belah pihak yaitu Soekarno, Tentara khususnya angkatan darat, dan PKI.<sup>21)</sup>

---

20. Ibid. hal. 369.

21. Ruslikarim. op.cit. hal. 123.

B. Stabilitas Politik Dan Pemerintahan Tingkat Regional Sulawesi Selatan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Pulau Sulawesi dijadikan satu wilayah pemerintahan propinsi, dan Makassar sebagai pusat pemerintahan serta Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gubernur. Pemerintahan republik ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya larangan dari sekutu dan kemudian atas penangkapan gubernur oleh Belanda beserta seluruh stafnya pada bulan Maret 1946. Mulai saat itu terbentuklah Negara Indonesia Timur (NIT) yang disponsori oleh Belanda, dan berpusat di Makassar.<sup>22)</sup>

Pulau Sulawesi kali ini menjadi daerah dalam suatu wilayah administratif yang lebih luas, meliputi seluruh Indonesia bagian timur kecuali Irian Barat. Pemerintahan NIT berlangsung hingga tahun 1950, baru kemudian Sulawesi kembali menjadi satu propinsi.<sup>23)</sup> Atas tuntutan-tuntutan rakyat Sulawesi Selatan yang pro republik, baik di parlemen maupun di luar parlemen lewat demonstrasi-demonstrasi menuntut agar NIT dibubarkan. Tuntutan itu lebih keras dilakukan oleh para bekas gril-ya yang menolak mematuhi resolusi Komprensi Meja Bundar (KMB) dengan menyeang kekuatan-kekuata militer

<sup>22.</sup> Barbara Sillars Harvey, Permesta pemberontakan Setengah Hati, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hal. 39.

<sup>23.</sup> Ibid.

NIT yang terdiri dari kekuatan-kekuatan KNIL yang dianggap menjadi sekutu Belanda. Permasalahan itu memuncak dengan datangnya pasukan-pasukan dari Jawa yang akan membantu penyelesaian terhadap komplik yang terjadi. Menurut pemerintah NIT bahwa pengiriman itu hanya menimbulkan permusuhan, dan dikemukakan bahwa KNIL yang ada di daerah ini cukup mampu untuk mempertahankan hukum dan ketertiban di daerah ini.<sup>24)</sup> Tentara KNIL yang sudah sejak tahun 1949 dimasukkan kedalam tentara Republik Indonesia Serikat, yang pada waktu itu daerah ini dijadikan pemerintahan militer oleh Letnan Kolonel Mokoginta. Andi Azis selaku pimpinan bekas KNIL tidak menyetujui kedatangan tentara dari Jawa, sehingga pada saat tentara akan mendarat di daerah ini, maka kesatuan-kesatuan KNIL pimpinan Andi Azis menahannya menyebabkan terjadinya kontak senjata

Kembali kepada tuntutan untuk kembali kenegara negara kesatuan Republik Indonesia, kaum gerilyawan yang pro-republik bekerjasama dengan Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (EPPRI) di Polombangkeng beserta dukungan rakyat Sulawesi Selatan mengirim Karaeng Daeng Manjurungi dan Muhammad Riri Amin Daud ke Yogyakarta

---

<sup>24</sup> • Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hal. 151

DAN KIR.

ibu kota Republik Indonesia Serikat, sebagai utusan resmi membicarakan tentang tuntutan sebahagian besar rakyat Sulawesi Selatan agar NIT dibubarkan. Bersamaan dengan itu di Sulawesi Selatan diadakan pemilihan yang dimenangkan oleh kelompok republiken dalam parlemen NIT, sehingga kabinet jatuh dan digantikan oleh kabinet Diapari. Kabinet ini menghadapi tuntutan yang serupa sehingga kabinet Diapari tidak bisa bertahan lama, kemudian digantikan kabinet transisi di bawah Ir. M. Putuhina pada 10 Mei 1950.<sup>25)</sup>

Pada tanggal 17 April 1950 dicetuskan suatu pernyataan yang dikenal dengan "Proklamasi Polombangkeng" berisi ikrar bahwa daerah Sulawesi Selatan tidak tunduk lagi pada pemerintah dan Undang-Undang NIT, dinyatakan bahwa satu-satunya pemerintah yang diakui adalah pemerintah Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar yang diakui adalah UUD 1945. Pernyataan ini ditandatangani oleh Karaeng Manjurungi, Amin Daud, A. Jalal Daeng Leo, dan Andi Selle, atas nama kesatuan gerilya dan partai-partai yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk Partai Masyumi pada 20 April 1950, maka Dewan Sulawesi Selatan secara resmi melepaskan diri dari NIT.<sup>26)</sup>

<sup>25</sup>. Sarita Paweloy, Arus Revolusi di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Prop. Sul-Sel. Masa Bakti 1985-1989, 1987), hal. 15.

<sup>26</sup>. Ibid.



Atas desakan dari partai-partai politik yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk Masyumi, serta demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Sulawesi Selatan membuat Kabinet Putuhina mengambil keputusan untuk ke Jakarta melakukan perundingan tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 12 Mei 1950.<sup>27)</sup> Perundingan inilah menghasilkan keputusan untuk kembali ke negara kesatuan pada 17 Agustus 1950.

Setelah NIT dibubarkan, maka perhatian utama tokoh-tokoh politik dari semua partai politik yang ada di Sulawesi Selatan, seperti M. Nur (ketua Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan), Lanto Daeng Pasewang (dari PKR), menghususkan perhatiannya tentang stabilitas politik dan pemerintahan yang berotonomi.<sup>28)</sup> Karena dengan sistem pemerintahan otonom di daerah ini yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara kesatuan, maka memungkinkan akan tercipta masyarakat yang tentram. Sehubungan dengan itu David Easton dalam bukunya "An Approach to the Analysis of Political System World Politics", mengatakan politik merupakan suatu alat kekuasaan untuk menciptakan suatu masyarakat yang tentram,<sup>29)</sup> dalam ketatanegaraan Indonesia.<sup>30)</sup>

<sup>27)</sup> Yusuf Bauty. "Pemecahan Soal Politik di Indonesia Timur Khususnya di Sul-Sel", Edisi Istimewa Mingguan Berjuang, (Kamis 15 Juni 1950), hal. 11.

<sup>28)</sup> Ibid.

Apa yang telah dikatakan di atas, menunjukkan bahwa peranan Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di daerah ini cukup besar, sekalipun masih menghadapi banyak tantangan-tantangan seperti masalah gerilya, tetapi dapat dikatakan sebagai proses kearah stabilitas, yang oleh Ulf Sundaussen mengatakan bahwa mekanisme politik dan pemerintahan di Indonesia setelah kembali ke negara kesatuan banyak mendapat tantangan baru, lanjut dikatakan sebagai suatu proses stabilitas politik dan pemerintahan.<sup>31)</sup>

Pemulihan politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan setelah kembali ke negara kesatuan adalah merubah sistem pemerintahan feodal bersama swaprajanya menuju ke sistem pemerintahan yang sesuai dengan negara kesatuan. Sehubungan dengan itu oleh Yusuf Bauty mengatakan bahwa untuk mengembalikan pemerintahan di Sulawesi Selatan, yang sesuai dengan konsep negara kesatuan, maka sistem feodal dan swapraja yang ada di Sulawesi Selatan harus dihancurkan.<sup>32)</sup>

<sup>29.</sup> Mary Grizes Kweit, Robert W. Kweit, Konsep analisa Politik, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 127

<sup>30.</sup> Agenda Kementerian Agama RI 1951-1952, (Jakarta: Kementerian Agama RI., 1951), hal. 52.

<sup>31.</sup> Ulf Sundaussen, Politik Militer Indonesia. 1945-1965 Menuju Dwi Fungsi ABRI, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 85.

<sup>32.</sup> Yusuf Bauty. Pemecahan Soal Politik di Indonesia timur Khususnya di Sul-Sel., op. cit. hal. 3

Perubahan sistem politik itu ditandai oleh adanya Komite Nasional Indonesia Sulawesi Selatan, yang dibentuk oleh rakyat Sulawesi Selatan di Makassar.<sup>33)</sup> Oleh karena itu, maka Dewan Hadat Tinggi yang dibentuk pada masa NIT dirubah menjadi Dewan Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan.

Sebelum membicarakan proses perubahan sistem pemerintahan di Sulawesi Selatan lebih lanjut, kita menelusuri kembali sistem pemerintahan pada masa NIT. Sistem pemerintahan daerah Sulawesi Selatan sebelum tahun 1948, terbagi atas dua yaitu; sistem pemerintahan kerajaan dan badan-badan hadatnya, dan kedua adalah sistem pemerintahan residentil yang dikepalai oleh seorang residen.<sup>34)</sup>

Daerah pemerintahan kerajaan (Landchap), yang terdiri dari tiga puluh kerajaan, Badan-badan hadatnya terdiri dari sembilan badan hadat.<sup>35)</sup> Peraturan-peraturan kerajaan dipegang oleh pemerintah kerajaan. Sedangkan peraturan-peraturan pemerintahan residentil ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda (Gubernumen) berdasarkan Undang-Undang Hindia Belanda pada 16 Januari 1947 No. 2 dan 33 statblaad No. 9 dan 10.<sup>36)</sup>

<sup>33.</sup> Ibid.

<sup>34.</sup> Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah, (Jakarta: Bakti Baru Berita Utama, 1982), hal. 21.

<sup>35.</sup> Ibid.

<sup>36.</sup> Ibid. hal. 22.

Pada 18 Oktober 1948 pemerintah kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan bersama dengan Dewan Hadat membentuk "Gabungan Slebes",<sup>37)</sup> dengan struktur pemerintahan; pertama adalah Hadat Tinggi yang beranggotakan 15 orang, kedua adalah Majelis Harian Hadat Tinggi yang beranggotakan 5 orang termasuk ketua dan kepala daerah; ketiga Ketua Hadat Tinggi; dan keempat adalah Dewan Sulawesi Selatan.<sup>38)</sup>

Setelah Gabungan Slebes dibentuk, maka pada 1 Oktober 1949 ditetapkan dengan surat penetapan Menteri Dalam Negeri NIT tertanggal 20 Agustus 1949, No. P.Z. 1/67/28, menghapuskan sistem residen di Sulawesi Selatan, dan pemerintahan residen itu diserahkan pada pemerintahan daerah dan komisaris-komisaris negara.<sup>39)</sup>

Selanjutnya dengan berdasarkan pernyataan surat penetapan Gabungan Slebes No. P.Z.1/67/29, maka secara administratif daerah Sulawesi Selatan terbagi atas tujuh afdelin yaitu; Afdelin Makassar, afdelin Bantaeng, afdelin Bone, afdelin Pare-pare, afdelin Mandar, dan afdelin Luwu.<sup>40)</sup>

37. ANRI Perwakilan Sul-Sel, Koleksi H.A.R. Tamma, Registrasi No. 544, bagian 1.

38. Ibid.

39. Irawan Soejito, Sejarah Pemerintahan Daerah-Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Paradnya Paratama, 1984), hal. 21.

40. Lihat Karya Mas, Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Agak Sulit, Berjuang, (No. 12 tahun I), Tanggal 25 September 1950, hal. 4.

Akibat dari pemberontakan Andi Azis pada tanggal 5 April 1950, menyebabkan pemerintahan mengalami perubahan, semua kekuasaan seperti Hadat Tinggi digantikan dengan pemerintahan darurat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ganti dengan Dewan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan 5 orang, tidak termasuk kepala daerah. Dewan ini dibentuk berdasarkan kongres rakyat Indonesia Timur yang dilaksanakan pada 17-19 Juni 1950.<sup>41)</sup> Dalam konres itu dibentuk juga komisi penyelidikan rencana penyelesaian masalah politik di Indonesia Timur. Komisi yang dibentuk itu bertugas mempersiapkan pemulihan pemerintahan NIT ke dalam pemerintahan republik, termasuk di dalamnya penyelidikan terhadap Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia.<sup>42)</sup>

Untuk melaksanakan hasil-hasil komisi itu, maka dibentuklah badan-badan perwakilan rakyat propinsi sesuai dengan Undang-Undang pokok Republik Indonesia, no. 22 tahun 1948. Berdasarkan Undang-Undang itu, maka pemerintahan NIT dan segala alat-alat pemerintahan dalam negara bagian-bagiannya serta senat, komisaris -

41. ANRI, op. cit. Bagian II.

42. Masiara, Mingguan Berjuang, (No. 12 tahun I) tanggal 25 September 1950, hal. 10.

komisaris negara, jabatan-jabatan sekretaris jenderal dan kementerian-kementriannya ke dalam jabatan-jabatan propinsi.<sup>43)</sup> Sehubungan dengan itu, maka Presiden Soekarno datang ke Sulawesi Selatan pada 28-31 Juli 1950, mengadakan pertemuan dengan komisi serta raja-raja di Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 1950 di Istana Kepresidenan NIT.<sup>44)</sup>

Sejak terbentuknya kabinet likwidasi NIT yaitu kabinet Putuhina, berhasil menyusun Undang-Undang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur (UU No.44 tahun 1950) pada 15 Juli 1950.<sup>45)</sup> Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai penataan pemerintahan sementara di Sulawesi Selatan. Dengan Undang-Undang itu juga, maka pemerintahan badan-badan swapraja di Sulawesi Selatan diganti menjadi Dewan-Dewan Pemerintahan Daerah.<sup>46)</sup>

Untuk mengurus pemerintahan dan otonomi propinsi di Sulawesi Selatan diserahkan kepada B.W. Lapien sebagai acting gubernur. Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh Badan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah), yang masing-masing diketuai oleh N. Syahadat (ketua DPRD), dan I.A. Saleh

43. Ibid.

44. Ibid. hal. 11

45. Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, (Desertasi Doktor Pada Universitas Indonesia, (Jakarta: 1975), hal.438-439

46. ANRI, op. cit. Registrasi No. 544, Bagian II.

Daeng Tompo (sebagai Kepala Daerah).<sup>47)</sup> Pada 1 Maret 1951 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan berhasil mengotonomkan daerah Sulawesi Selatan menjadi satu otonomi propinsi.<sup>48)</sup>

Pada 10 Mei 1951 Ketua Dewan Pemerintahan Daerah I.A. Saleh Daeng Tompo digantikan oleh H.A. Patoppoi. Kepala Daerah yang baru itu mengadakan pertemuan dengan Acting Gubernur B.W. Lapien untuk membicarakan rencana pembentukan kabupaten-kabupaten yang berotonomi di bawah propinsi Sulawesi Selatan.<sup>49)</sup>

Perkembangan selanjutnya, atas tuntutan Partai-partai politik yang ada di Sulawesi Selatan (termasuk partai Masyumi), maka pada 28 Juni 1951 diangkatlah Sudiro sebagai gubernur, yang secara resmi di lakukan pada 4 Juli 1951 hingga 1953.<sup>50)</sup> Kemudian dengan berdasar keputusan preside Republik Indonesia, Gubernur Sudiro digantikan oleh Lanto Daeng Pasewang, yang menjabat dari tahun 1953 hingga tahun 1956. Namun karena sakit, maka jabatan gubernur ditangani oleh Winarno Danuatmojo dari tahun 1953-1954, selanjutnya oleh Andi Baharuddin dari tahun 1954-1956. Kemudian digantikan oleh Andi Pangerang Pettarani dari tahun 1956 sampai tahun 1960.<sup>51)</sup>

47. Harum Kadir dkk., Sejarah Daerah Sulawesi Selatan, (Jakarta: Dep. Dik, Bud., 1978), hal. 99.

48. Ibid.

49. Ibid. hal 100.



Dapat disimpulkan bahwa antara tahun 1950 sampai tahun 1955, stabilitas pemerintahan di Sulawesi Selatan merupakan proses penataan atau peralihan pemerintahan dari Negara Indonesia Timur yang bersifat feodal ke bentuk pemerintahan republik yang bercorak kesatuan. Proses peralihan itu dapat dikatakan berjalan dengan baik, sekalipun mendapatkan tantangan-tantangan serta kemelut-kemelut politik yang terjadi.

Dengan adanya kerja sama antara tokoh-tokoh politik dan partai-partai politik yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk di dalamnya Partai Masyumi, dalam pemulihan politik dan tata pemerintahan sehingga terwujudlah suatu otonomi pemerintahan di daerah ini.

Dengan demikian sudah dapat dikatakan bahwa peranan Partai Masyumi Cabang Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan permasalahan politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan cukup penting dan tidak dapat di sangkal lagi. Demikian juga perjuangannya tentang konsep sari'ah, bahwa ternyata ajaran yang dikembangkan oleh Partai Masyumi di Sulawesi Selatan terutama dalam hubungannya dengan pemerintahan di Sulawesi Selatan cukup menunjukkan perkembangan, hal ini terlihat setelah pemilihan umum 1955.

---

50. Soebagijo. I.N. Sudiro Pejuang Tanpa Henti, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hal. 230

51. Ibid.

C. Terlibatnya Tokoh-Tokoh Masyumi Dalam PRRI/Permesta.

Pemilihan Umum adalah merupakan mekanisme politik yang inheren dalam sistem demokrasi. Diharapkan dengan pemilihan umum itu, rakyat yang punya aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasinya lewat partai-partai politik, atau calon-calon yang mereka dukung. Demikianlah yang terjadi pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, termasuk di Sulawesi Selatan.<sup>52)</sup>

Partai-partai politik yang ikut dalam pemilihan umum pada waktu itu merupakan pemain dalam pesta demokrasi, yang pertama dalam suatu negara yang baru sepuluh tahun hidup dalam alam kemerdekaan.<sup>53)</sup> Sekalipun peserta pemilihan umum itu terlalu banyak golongan, namun bila dilihat dari kaca mata konsep Soekarno tetap beranjak dari tiga aliran utama yaitu; Agama, Nasionalisme, dan Komunisme sosialisme.<sup>54)</sup>

---

52. A. Syafii Maarif. Islam Dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1988), hal. 40.

53. Ibid. hal. 41.

54. Ruslikarim. Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut, (Jakarta: CV. Raja Wali, 1983), hal. 121.

Terhadap konsepsi Presiden Soekarno itu ada : yang pro dan yang kontra, yang secara tegas menerima adalah PKI dan PNI serta beberapa partai kecil nonagama Sedangkan yang secara tegas menolak adalah Partai Masyumi dan Katolik, yang menolak secara samar-samar adalah NU, PSII, Parkindo, IPKI dan PSI. Konsepsi presiden tersebut justru menambah ketegangan, karena muncul bentuk pertentangan baru antara golongan yang kontra dengan golongan yang pro kepadanya, sehingga golongan yang kontra merasa adanya ancaman dari golongan yang pro.<sup>55)</sup>

Pergolakan di daerah muncul pula di Sulawesi. Pada tanggal 2 Maret 1957 berdiri Dewa Perjuangan Rakyat Semesta di bawah pimpinan Panglima Divisi Indonesia Timur Letkol Vantje Samuel yang menggantikan J.F. Warouw. Dewan ini memperjuangkan dilaksanakannya repelita dan pembagian pendapatan daerah secara adil. Indonesia Timur dalam keadaan darurat perang (SOB) dengan menempatkan kekuasaan sipil di bawah kekuasaan militer. Di Kalimantan juga oleh Letkol Hasan Basri panglima divisi setempat mendirikan Dewan Lambung Mangkurat pada tanggal 13 Maret 1957, seperti halnya daerah-daerah lain, Lambung Mangkurat juga menuntut perlakuan yang lebih baik dari pusat.<sup>56)</sup>

---

55. Ibid. hal 56

56. M.C. Ricklefs, op'cit. hal. 394.

Pemerintah tidak dapat memulihkan pergolakan-pergolakan daerah serta perekonomian yang semakin merosot menyebabkan kabinet Ali mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 14 Maret 1957, yang terlebih dahulu Masyumi menarik diri dari kabinet yaitu pada tanggal 9 Januari 1957.<sup>57)</sup>

Tampaknya terjadi suatu jalan buntu politik di Jakarta. Banyak orang yang merasakan bahwa sistem konstitusional tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi tidak diketahui juga apa yang akan menyusul. Beberapa orang menghendaki Kabinet Hatta yang baru yang dianggap satu-satunya orang yang bisa memuaskan daerah. Karena pada umumnya daerah luar Jawa menuntut otonomi yang lebih besar dari pusat. Dalam banyak hal mereka yang mempunyai hubungan pemimpin-pemimpin Masyumi setempat, sebagai satu-satunya diantara partai empat besar yang bersimpati kepada kekecewaan daerah.<sup>58)</sup>

Setelah kabinet Ali jatuh, maka presiden Soekarno mulai memainkan politik dengan mengumumkan keadaan Darurat perang (SOB). Presiden menunjuk Soewirjo sebagai formatur kabinet, akan tetapi kabinet ini gagal menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal 4 April 1957 Presiden mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur kabinet.

---

57. Ibid. hal.385.

58. Ibid.

Dari hasil kerja Formatur ini terbentuklah kabinet karya dengan Ir. Juanda sebagai Perdana Mentri nya. Kabinet yang dibentuk Presiden ini bukan lagi pencerminan hasil pemilihan Umum dan sistem kabinet itu sendiri. Kabinet karya ini disebut sebagai kabinet karya darurat Ekstra parlementer. 59)

Menurut Presiden Soekarno bahwa kabinet karya adalah suatu kabinet karya dalam penyusunannya merupakan keahlian dan kecakapan menteri-mentri yang dipentingkan bukan aliran politik atau aliran-aliran yang ada dalam parlemen (DPR). 60)

Kabinet Karya ini menghadapi tantangan yang sangat berat yaitu pecahnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta sejak 20 Juli 1956, Hatta mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden dan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1956. Ini berarti terlemparnya tokoh luar Jawa yang paling dikagumi dari pusat pemerintahan. Hatta merasa berkecil hati karena jalan yang ditempuh negara. Dalam pidatonya, ia mengecam partai-partai yang hanya mendasarkan pada kepentingan-kepentingan peribadi yang sempit. Mengenai hal itu presiden sepakat, namun dalam banyak hal mereka tidak sejalan. 61.)

---

59. Poerwantana, op cit. hal 56

60. Ibid.

61. Ricklefs, op cit. hal. 383. Lihat juga Permesta, op cit. hal. 25-28

Soekarno mulai meningkatkan prakarsanya dimuka umum. Disekelilingnya kini berkerumun kaum radikal non partai, diantaranya adalah para pengagum Tan Malaka pada masa revolusi. Dalam pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1956, Soekarno meminta agar partai-partai di-  
bubarkan. Dua hari kemudia mengatakan bahwa dia memp-  
unyai satu pemikiran, suatu konsepsi tentang satu pe-  
mikiran yaitu sistem Demokrasi Terpimpin. Natsir dan  
para pemimpin Masyumi lainnya menentang gagasan itu .  
Orang luar Jawa merasa cemas dengan sistem pemerintaha-  
an Soekarno yang mendapat dukungan dari PNI, NU PKI dan  
Murba. Suatu pemerintahan Jawa dan kaum radikal yang  
bertentangan dengan mereka dan Partai Masyumi.<sup>62)</sup>

Partai Masyumi sudah merasa tersisih dengan ada-  
nya konsepsi presiden itu. Masyumi melihat bahwa sis-  
tem yang diciptakan Soekarno itu merupakan suatu sistem  
pemerintahan yang mengarah ke otoriter. Karena dengan  
itu maka perwira-perwira militer pembangkan mengadakan  
pertemuan di Sungai Dareh Sumatra Barat, antara tanggal  
9 dan 13 Januari 1958. Dalam pertemuan itu hadir Kolo-  
nel Simbolon, Zulkifli Lubis, Akhmed Husein, Barlian,  
Vantje Samuel dan Dahlan Jambek. Sedangkan tokoh-tokoh  
politik sipil yang hadir adalah Syafruddin Prawiranegara,  
Sumitro djojohadikusumo, dan M. Natsir. Dalam pertemuan

---

<sup>62</sup>. Ibid

itu diputuskan untuk mendirikan pemerintahan tandingan bila tuntutan-tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pusat di Jakarta.<sup>63)</sup>

Pada tanggal 10 Februari 1958 Simbolon dan Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat di Padang. Ultimatum itu berjudul "Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan Negara", dan meminta agar kabinet Juanda dibubarkan, Soekarno kembali kepada posisinya sebagai presiden konstitusi berdasarkan UUDS 1950 yang berlaku pada waktu itu, dan Hatta beserta Hamengkubuwono ditunjuk untuk membentuk "Zaken Kabinet" yang terdiri dari tokoh-tokoh yang jujur, disegani, cakap dan tidak anti agama.

Ketika batas waktu ultimatum itu berakhir dan tidak diindahkan oleh pemerintah pusat Jakarta, maka para promotor pembangkang akhirnya melahirkan pemerintahan tandingan pada tanggal 15 Februari 1958 yang diberi nama "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI) yang bermarkas di Bukit Tinggi. Syafruddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri, Kolonel J.F. Warouw sebagai menteri pembangunan dan industri, Letkol Saleh Lahade sebagai menteri penerangan, Muchtar lintang sebagai Menteri Agama Letkol Vantje Samual sebagai Panglima Angkatan Darat. Sedangkan anggota-anggota kabinet dari sipil ialah: M. Natsir, Burhanuddin Harshap, Sumitro djojohadikusumo, dan Simbolon (militer)<sup>64)</sup>

63. Barbara S. Harvey, *Permesta*, *op cit.* hal. XII

64. Ricklefs, *op cit.* hal. 396

Pemberontakan PRRI erat sekali hubungannya dengan pemberontakan Permesta di Sulawesi, maka pemberontakan ini disebut Pemberontakan PRRI/Permesta. Hal ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh yang ikut menanda tangani pembentukan PRRI di Padang. di samping itu dengan terdapatnya tokoh-tokoh Masyumi dalam PRRI/Permesta, menyebabkan semakin dikucilkannya partai ini, dan dicap sebagai penghiatan terhadap pemerintah pusat.<sup>65)</sup>

Dengan meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta memberikan dampak yang besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia menjadi lebih renggang terutama dengan Amerika Serikat. Jakarta melihat jelas dukungan Amerika terhadap Pemberontakan PRRI/Permesta. Pada tanggal 18 Mei 1958 seorang pilot sipil Amerika Serikat yang mengendalikan pesawat pengebom B-16 ditembak jatuh di atas Ambon ketika sedang sibuk melakukan pengeboman sebagai dukungan kepada pihak pemberontak.<sup>66)</sup>

Tamun Amerika Serikat telah menyadari dirinya bahwa dukungannya akan mengalami kegagalan, maka Menteri Luar negeri Amerika J.F. Dulles mengancam campurtangan untuk kepentingan PRRI/Permesta. Peristiwa itu telah meninggalkan perasaan yang tidak enak kepada Soekarno, dan PKI memampatkan kesempatan itu untuk mendukung Soekarno sebagai anti Amerika Serikat.<sup>67)</sup>

---

65. Ricklefs. op cit. hal. 398

66. Ibid.

67. Ibid. hal 399

BAB IV

KEADAAN AKHIR PARTAI POLITIK MASYUMI

A. Masyumi Menghadapi Batu Karang.

Partai Masyumi menghadapi rintangan yang paling berat dengan munculnya Soekarno dengan gagasannya tentang Demokrasi Terpimpin setelah Pemilihan Umum 1955. Presiden Soekarno melihat adanya ketidak mampuan partai-partai politik yang berjumlah banyak itu memben - dung percekocokan antara sesama partai, yang menyebabkan ketidaksatabilan politik.

Keinginan Presiden Soekarno untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam kehidupan politik, dan bukan hanya sekedar lambang saja seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dipihak lain militer juga ingin memainkan peranan dalam politik. Pihak militer melihat pemerintahan sipil sudah tidak mampu, serta tak dapat dipercaya lagi dalam menjalankan roda pemerintahan. 4)

Di dalam tubuh parlemen, tiga partai utama yang paling berperan dan sering mengadakan koalisi, yakni Masyumi, PNI, dan NU, tampak begitu kurang serasi lagi kerjasamanya setelah Pemilihan Umum 1955. Bersamaan dengan itu peranan PKI semakin menonjol karena mendapat angin baik dari Soekarno. Khusus mengenai tiga aliran politik yang sangat berpengaruh pada waktu itu,

(1. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1978), hal. 30-31.

Islam, Nasionalis, dan Komunis. Hubungan yang kurang serasi bermula dari masa kampanye Pemilihan Umum, dua tahun sebelum dilangsungkan. Posisi ideologi masing-masing partai semakin jelas. Konflik antarideologi terlihat di dalam Lembaga Konstituante, yang sampai pada pertengahan tahun 1959 tidak mampu menyelesaikan tugasnya, menyusun UUD untuk menggantikan UUDS 1950 yang pada akhirnya mendorong Soekarno untuk mengambil tindakan melakukan Dekrit 5 Juli 1959.

Peranan Parlemen lama kelamaan beralih ke tangan Soekarno. Melalui Demokrasi Terpimpinnya ia mencela Demokrasi Barat yang leberistik, yang menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga menyebabkan tak mampu membentuk sebuah pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan negara untuk membangun. Kritik Soekarno ini mendapat dukungan masyarakat termasuk pimpinan militer. Donald Wilhelm melukiskan masa menjelang mundurnya peranan partai politik pada umumnya dan Masyumi khususnya.

" Meskipun Soekarno memiliki banyak sifat yang menarik bahkan luhur, namun justru di bawah kepemimpinannya lah rakyatnya menyaksikan kemunduran dan malahan dalam praktek keruntuhan demokrasi konstitusional di Indonesia. Karena Partai-partai dan kabinet-kabinet yang dibentuk daripadanya, ternyata tidak mampu atau tidak mau bertindak konstruktif dan tegas, keadaan menjadi semakin buruk. 2)

---

2. Donald Wilhelm, Indonesia Bangkit, (Terjemahan Suli Suleiman) (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1981), hal. 29

Partai-partai politik di mata Soekarno pada masa itu, sama jeleknya dengan penyakit, seperti yang telah diucapkan dalam pidatonya pada tahun 1956, yang disebutnya sebagai penyakit kepartaian yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan kita selalu cakar-cakaran satu sama lain. Karena itu presiden mengajak "sekarang marilah kita semua bersama-sama mengubur semua partai-partai."<sup>3)</sup>

Tidak saja partai-partai yang diserang dan dibenci Soekarno, Demokrasi Liberal pun jadi sasaran politiknya. keritikannya berikut:

" Demokrasi yang saya dambakan untuk Indonesia bukanlah Demokrasi Liberal seperti yang terdapat di Eropah Barat. Tidak ! Apa yang saya inginkan untuk Indonesia adalah suatu Demokrasi Terpimpin, suatu demokrasi dengan pimpinan. Demokrasi Terpimpin, demokrasi terpimpin, sesuatu yang dipimpin tetap demokrasi. Dengan sistem partai kita mengalami kemacetan total, itu tidak sehat; harus dirombak sama sekali".<sup>4)</sup>

Seminggu setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinetnya yang baru, menggantikan kabinet Juanda yang mengembalikan mandatnya pada tanggal 6 Juli 1959. Kabinet Juanda adalah kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parlementer ke periode Demokrasi Terpimpin. Dalam kabinet baru ini Ir. Juanda tetap

<sup>3</sup>. Alfian, *op cit.* hal. 32-33. Lihat juga Ruslikarim, *op cit.* hal. 140

<sup>4</sup>. *Ibid.*

diberi posisi penting sebagai Menteri Pertama yang tugasnya tidak jauh berbeda dengan tugas Perdana Menteri<sup>5)</sup>.

Kabinet baru yang di bawah payung UUD 1945 ini diberi nama "Kabinet Kerja". Kabinet kerja I ini diumumkan pada 9 Juli 1959, dan mulai berlaku pada 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Kabinet Kerja II dimulai 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962, dengan sedikit mengalami perubahan yaitu terdapatnya dua orang wakil menteri pertama yang masing-masing Dr. J. Leimena dan Dr. Soebandrio, sedang Menteri Pertama tetap pada Ir. Juanda. Pada Kabinet Kerja III 6 Maret 1962 sampai 13 November 1962 tidak ada lagi menteri utama, tetapi semuanya disebut "Menteri".<sup>6)</sup> Kabinet inilah yang akan melaksanakan gagasan Soekarno dalam bentuk Demokrasi Terpimpin. Demokrasi gaya baru inilah yang membawa Soekarno ke puncak kekuasaannya yang memang sudah diidam-idamkan.<sup>7)</sup>

Bila dihubungkan dengan konsep perjuangan ummat Islam Indonesia di dalam kehidupan politik maka pandangan ummat Islam terhadap Demokrasi Terpimpin, tidak saja berbeda pandangan, tetapi menyebabkan terpeca-belah. Pilihan untuk turut atau tidak dalam sistem kekuasaan telah membelah ummat Islam Indonesia

5. J.D. Legge, Soekarno. A Political Biography, (New York, Washinton: Praeger Publishers, 1972), hal. 344

6. A. Syafii Maarif, op.cit. hal. 49

7. Ibid.

menjadi dua kubu yang saling berhadapan, sedangkan posisi politik mereka sudah tidak diperhitungkan lagi.

Sejak NU menarik diri dari Masyumi pada tahun 1952, dan NU muncul sebagai partai politik. Dalam menghadapi banyak kasus, partai Islam baru ini lebih dekat dengan PNI atau bahkan PKI ketimbang Masyumi. Sikap Masyumi menentang ide Demokrasi Terpimpin, sementara NU dan Perti yang turut serta di dalamnya, telah semakin menempatkan Partai Masyumi pada posisi politik yang terpencil, khususnya pada era setelah jatuhnya kabinet Ali-Roem-Idham pada bulan Maret 1957. Masyumi yang beraliansi dengan partai-partai kecil lainnya seperti PSI dan Partai Katolik, jelas tidak bisa menolong posisi politiknya dalam parlemen (DPR) yang semakin melemah.<sup>8)</sup>

Memang bila dilihat dari cita-cita demokrasi, pilihan Masyumi adalah tepat, namun budaya politik yang berkembang adalah budaya politik yang otoriter, dengan Soekarno dan pimpinan tertinggi Angkatan Darat sebagai pemain-pemain utamanya. Dalam situasi seperti itu cita-cita demokrasi yang hanya didukung oleh suara minoritas dalam parlemen adalah seperti orang berteriak di tengah padang pasir, tidak ada telinga yang memperdulikannya. Situasi bagi Masyumi semakin memburuk setelah pada akhir tahun 1957 beberapa tokohnya

<sup>8</sup> B. A. Syafii Maarif, op cit. hal. 50

menyertai pergolakan daerah, sekalipun dengan tujuan ingin menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang diuji coba oleh sementara panglima - daerah Angkatan Darat dalam usaha menentang pemerintah pusat di bawah pimpinan Soekarno dan dengan dukungan Nsution. Tanpa didukung oleh Masution plus pimpinan AD, kita tak dapat membayangkan bahwa Soekarno akan melangkah begitu jauh.

Demokrasi Terpimpin dalam prakteknya adalah sistem politik dengan baju demokrasi, tapi mines demokrasi. Hal ini dilakukan Soekarno, hanya sebagai landasan dari ketidak pusannya jadi tukang stempel, dalam arti seorang presiden simbol sebagaimana ditentukan UUDS 1950 yang menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan Demokrasi Parlemerter. Pendeknya Soekarno mau langsung memimpin pemerintahan. Tampaknya ia cukup kecewa pada waktu Sutan Syahrir pada pertengahan bulan November 1945 berhasil menyisihkan Soekarno dari pimpinan eksekutif dengan membentuk kabinet parlemerter pertama. 9)

Keinginan Soekarno untuk berkuasa langsung di sampaikan pertama kali pada 28 Oktober 1956 dengan mengemukakan tentang konsepsinya, yang antara lain

---

9. Ibid. hal. 51

berisi tentang ide pembentukan Dewan Nasional, dan keterlibatannya secara langsung dalam memimpin pemerintahan. Tindakan semacam ini oleh banyak orang di pandang sebagai bertentangan dengan UUDS yang masih berlaku pada waktu itu. Diantara reaksi dari tindakan politik Soekarno itu, diberikan oleh M. Isa Anshary, anggota DPR dan salah seorang pemimpin Masyumi sayap radikal. Dalam Majalah Daulah Islamiyah ia menulis: bahwa :

" Konsepsi Bung Karno adalah pelaksanaan ide beliau yang diucapkan pada 28 Oktober 1956 untuk menguburkan partai-partai dan pidato beliau di Rapa Merah Putih di Bandung dimana beliau menyatakan keinginan untuk turut aktif dalam pemerintahan. Jadi Dewan Nasional bukanlah semata-mata dewan penasehat tetapi adalah dewan yang memungkinkan presiden ikut aktif dalam pemerintahan. Pemerintahan Soekarno itu berlainan dari pemerintahan demokrasi biasa, karena pemerintahannya adalah pemerintahan tanpa oposisi, dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ketiga-tiganya, baik ikutnya presiden dalam pemerintahan secara aktif, maupun tidak bertanggung jawabnya kepada parlemen sebagai orang yang ikut memerintah atau tidak adanya oposisi di dalam negara, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang tumbuh di Indonesia. 10.)

---

10 . M. Isa Anshary, Musyawahar Nasional Daulah Islamiyah, No. 9, Th.1 (September 1957), hal. 5  
Lihat juga Dr. A. Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hal. 52



Dengan tindakan politik itu, Soekarno kelihatannya tidak sabar menunggu hasil-hasil sidang Majelis Konstituante yang pada waktu itu baru memulai pekerjaannya selama enam bulan. Juga adanya tentang ide pembentukan Dewan Nasional yang dapat ditafsirkan orang sebagai kekuatan ekstra parlementer itu, berarti Soekarno kurang atau tidak menghargai DPR hasil pilihan rakyat, Ironinya lagi ialah bahwa dengan konsepsinya Soekarno hendak merubah sistem Konstitusional Indonesia sampai kedasar-dasarnya, sebagaimana yang diucapkannya pada tanggal 22 Februari 1957 di Istana Negara. <sup>17)</sup>

Cara-cara berpikir dan bertindak yang tidak Konstitusional ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang presiden yang telah disumpah secara Konstitusional. Tetapi karena budaya politik otoriter pada waktu itu telah menyerusak kepermukaan politik Indonesia, maka orang mulai merasa tidak begitu terikat lagi dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi. Jelas gejala semacam ini merupakan gejala yang tidak sehat bagi pembangunan sebuah demokrasi pada negara yang baru merdeka.

Kekecewaan Soekarno dengan keadaan sebenarnya juga berpangkal pada kegagalannya mewujudkan kehendaknya untuk kabinet gotong royong atau kabinet ber-

<sup>17)</sup> Ibid.

kaki empat, dimana PKI turut serta di dalamnya. <sup>12)</sup> Dewan Nasional kemudian dibentuk pada 11 Juli 1957 yang langsung diketuai oleh Soekarno. Kemudian dengan terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang juga diketuai Soekarno, menggantikan tugas Dewan Nasional di mulai pada tanggal 22 Juli 1959 di bawah UUD 1945. <sup>13)</sup> Pembentukan Dewan Nasional memang tidak jelas dasar hukumnya. Oleh karena itu negarawan-negarawan seperti Hatta, Natsir dan Syahrir telah mengemukakan pembentukan dewan yang tak punya dasar Konstitusi. <sup>14)</sup> Tapi sebagaimana telah dikemukakan bahwa Soekarno telah mulai muncul sebagai seorang kepala negara otoriter, hingga dalam praktek politik dia sering berada di atas konstitusi. Dengan demikian kritik-kritik yang diberikan oleh tokoh-tokoh diatas tidak digubrisnya.

DPAS yang diketuai secara formal oleh Soekarno tetapi penanganan sehari-harinya diserahkan kepada wakil ketuanya, Roeslan Abdoelgani (PNI). Tokoh ini

<sup>12.</sup> Lihat Ali Sastriamijoyo, Tonggak-tonggak di Perjalananku (Jakarta: Kinta, 1974), hal. 372-373

<sup>13.</sup> Lihat Zulfikar Ghazali, DPA Dalam Sejarah Konstitusi Republik, Hukum Dan Pembangunan, No.5, Th. XVI (Oktober 1986), hal.453

<sup>14.</sup> Ibid. Lihat juga A. Syafii Maarif polit. ha. 53.

memang punya andil yang sangat besar dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. DPAS inilah yang mengusulkan agar pidato kenegaraan presiden 17 Agustus 1959 dijadikan Manifesto Politik (Manifol), yang kemudian berkembang menjadi Manifol-USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi ala Indonesia, Ekonomi Terpimpin, dan Keadilan Sosial), yang kesemuanya menjadi landasan Demokrasi Terpimpin.<sup>15)</sup> Manifol ini kemudian dijadikan mata kuliah wajib diseluruh perguruan tinggi di Indonesia.<sup>16)</sup>

Pembentukan dewan-dewan tersebut kemudian pada tanggal...Maret 1960 di tambah lagi dengan pembentukan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) sebagai ganti dari DPR pilihan rakyat yang dibubarkan, merupakan mekanisme dari pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Anggota-anggota yang duduk dalam dewan-dewan itu adalah mereka yang disukai oleh Soekarno, dan bertugas mengiakan tindakan politiknya, setidak-tidaknya secara formal. Tidak merherankan kalau orang-orang Masyumi dan PSI tersingkir, sebab kedua partai ini menentang politik Soekarno, dan mereka menilai sebagai manusia anti revolusi. Oleh Safii Maarif mengatakan bahwa pada bulan-bulan pertama pelaksanaan De-

---

15. Ibid. hal.454

16. A. Syafii Maarif op cit. hal. 53

morasi Terpimpin kita melihat proses kristalisasi yang cepat antara pendukung dan penentang terhadap demokrasi gaya baru ini. Siapa yang mendukung dibiarkan hidup, sedangkan siapa yang menentang harus disingkirkan. Pihak yang menentang akan turut dalam jaringan kekuasaan, sedangkan pihak yang melawan, tidak saja disingkirkan dari lembaga-lembaga politik formal, tetapi partai mereka dibubarkan, dan tokoh-tokohnya dipenjarakan bertahun-tahun tanpa proses pengadilan.<sup>17)</sup>

Sementara Soekarno memainkan kartunya menjelang Dekrit di luar DPR dan Majelis Konstituente, wakil-wakil rakyat dalam Majelis hasil pilihan rakyat sedang berdebat dengan hangatnya tentang masalah-masalah kenegaraan, seperti bentuk negara, dasar negara, hak-hak asasi, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan persoalan-persoalan mendasar tentang kenegaraan. Partai-partai Islam dalam Majelis pada umumnya dapat menggalang sesama mereka, khususnya pada waktu memperjuangkan Islam atau Pancasila ala Piagam Jakarta sebagai dasar negara.<sup>18)</sup>

Tapi di dalam Parlemen (DPR), partai-partai Islam belum tentu punya bahasa yang sama dalam menilai perubahan politik yang sedang berlangsung, sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa pihak Liga Muslimin

17. Ibid. hal. 54

18. Ibid. Baca juga Ridwan Saidi, Panji Masyarakat, No. 541, Th. XXVIII, (1 Juni 1987), hal. 11

(NU, PSSI, dan Perti), makin lama makin mengendorkan sikap politiknya terhadap tindakan Soekarno, sebaliknya Masyumi yang semakin terpencil terus saja meneruskan perlawanannya terhadap gagasan dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Masyumi lebih memilih jalan martir ketimbang menyerah, sekalipun jalan ini ternyata di belakang hari punya akibat-akibat yang jauh bagi pembangunan politik di Indonesia. Sekiranya Masyumi dapat lebih sabar dan tidak tenggelam dalam arus idealisme martir, barangkali sistem demokrasi tidak akan tersingkir begitu parah dalam sejarah moderen Indonesia.

Pada dasarnya apa yang dikatakan Soekarno dengan sistem yang dibuat sesuai dengan kepribadian Indonesia itu tidak terlihat dalam perwujudannya. Tetapi apa yang dikatakan dengan sistem itu bukanlah demokrasi yang diminta oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Bersamaan dengan gencarnya propaganda Demokrasi terpimpin, Soekarno mengeritik secara telak ide dan pelaksanaan demokrasi liberal yang menurut Soekarno telah menjauhkan Indonesia dari tujuan revolusi yang berupaya untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Soekarno sudah muak melihat pertentangan golongan -

golongan politik selama ini. Biang keladi dari semua ini menurut pandangan Soekarno tidak lain dari demokrasi liberal yang barat itu. Karena Indonesia adalah negara timur, maka sistem demokrasinya harus juga ber corak timur. Soekarno menegaskan bahwa demokrasi timur khususnya demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang didampingi oleh pimpinan. <sup>19)</sup> Bahkan dijelaskan bahwa Demokrasi Indonesia sejak jaman purbakala adalah demokrasi Terpimpin. <sup>20)</sup>

Orang tentu akan mempertanyakan, apakah pada jaman purbakala itu pernah ada demokrasi di nusantara ini, sebutlah itu demokrasi terpimpin sebagaimana Soekarno berandil. Tapi yang penting barangkali adalah bahwa kreasi sistem politik Soekarno ini mau dicari justifikasinya pada peninggalan nenek moyang yang kabarnya serba terpimpin itu. Boleh jadi serba terpimpin akan tetapi mengkaitkannya dengan demokrasi moderen sudah barang tentu menjadi barang yang terlalu sulit untuk ditemukan.

Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul " Penemuan Kembali Revolusi Kita" menjelaskan prinsip-prinsip dasar Demokrasi Terpimpin.

<sup>19)</sup> Ibid. . hal. 55. Lihat juga John Mc Ewen Reinhardt, Nationalism and Confrontation in the Southeast Asia Islands; The Sources of Indonesian Foreign Policy, Desertasi Ph.D. Tulane University, Louisiana 1967, hal. 83

<sup>20)</sup> Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi, Jakarta: Panitia Penerbit Di bawah Penderah Revolusi, 1964, hal.376

B. Keadaan Masyumi Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

Partai Masyumi telah menentukan sikap dalam menghadapi kekuasaan yang sudah terpusat di tangan Soekarno. Pada dasarnya ada dua pandangan yang saling berbeda dari kalangan partai-partai Islam terhadap Demokrasi Terpimpin. Masyumi memandang bahwa ikutserta dalam suatu sistem politik otoriter adalah penyimpangan dari ajaran Islam, sedangkan kelompok Liga Muslimin (NU, PSII dan Perti) ikutserta dalam Demokrasi Terpimpin. Saifuddin Zuhri (NU), membawakan nama dalil pesantren membenarkan NU ikutserta dalam sistem yang diciptakan Soekarno itu "Mala Yudareku Kulluhu la Yutruku ba'duhu" bahwa apa yang tidak bisa diraih 100%, cukuplah sebagian dan jangan dilepaskan. <sup>21)</sup>

Berdasarkan prinsip ajaran pesanteren, maka NU memutuskan untuk masuk dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Masyumi sebaliknya berpendirian bahwa masalahnya bukan terletak masalah untun atau tidaknya. Di mata Masyumi, Demokrasi Terpimpin akan membawa bencana bagi bangsa. Oleh sebab itu tindakan Soekarno harus dilawan, apapun akibatnya. Semangat inilah yang diistilakan dengan "Idealisme Martir". Masyumi sebagai cagar demokrasi tidak punya pilihan lain kecuali menghadapi Soekarno, sekalipun

21. A. Syafii Maarif, Op Cit. hal. 57. Lihat juga hasil Wawancara Saifuddin Suhri di Jakarta Pada 24 Mei 1978

sisa-sisa tenaga yang tidak seimbang. Harapan Masyumi bahwa rakyat akan berpihak kepada demokrasi, tidak kepada sistem otoriter, ternyata sia-sia. Sementara itu PKI yang lihai dalam manipulasi politik pada waktu itu berpihak sepenuhnya kepada sistem Soekarno. Hal ini sesuai dengan tujuan dari PKI untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, dan yang terbesar adalah Masyumi.<sup>22))</sup>

Politik PKI tentang golongan "kepala batu" sudah menyatu dengan politik Soekarno yang juga menilai Masyumi sebagai kekuatan "kepala batu" yang merintang penyelesaian revolusi Indonesia.<sup>23))</sup> Oleh sebab itu golongan modernis, khususnya Masyumi tidak patut lagi hidup pada era Demokrasi terpimpin. Dengan demikian, diantara prinsip Demokrasi Terpimpin sebagaimana dikemukakan Soekarno "tampa otokrasinya Diktatur"<sup>24))</sup> tidak berlaku bagi Masyumi. Masyumi harus dikorbankan demi revolusi, sikap penguasa seperti inilah yang sudah lama dirindukan oleh PKI sebagai kekuatan politik yang terlatih, PKI tentunya berucap mengapa kesempatan ini baru ada ? Adapun Liga Muslimin di mata PKI sekalipun juga musuh, tidak sesukar menghadapi "kepala batu Masyumi".<sup>25)</sup>

---

22. Ibid. hal. 58.

23. Ibid. Lihat juga Bernard Dahm, Soekarno and the Struggle For Indonesian Independence, terj. by Mary F. Sommers Heidhuis, Ithaca: Cornell University Press, 1969, hal. XII. baca Juga Harian Rakyat, 24 Mei 1960, hal. 4

Pila ditelusuri kembali logika revolusi Soekarno dalam kaitannya dengan partai-partai Islam. Menurut Muhammad Roem (dari tokoh Masyumi), bahwa revolusi itu ialah harus ditarik dan yang tegas antara yang musuh dan sahabat, revolusi. Masyumi dan pimpinan-pimpinannya dimasukkan dalam kategori Musuh revolusi dan karena itu harus disingkirkan.<sup>26</sup> Dengan gaya santai dan lucu Roem selanjutnya menulis :

"Sebelum kami dibawa ke Madiun selama dua bulan St. Sjahrir, Prawoto dan saya ditahan di sebuah rumah di kebayoran baru. Di situ "logika revolusi" mengganggu pikiran kami masing-masing. Tidak bagi kami sendiri dan keluarga kami umumnya. Bagi kami sendiri "logika revolusi" sama dengan "sewenang-wenang" dari yang berkuasa; yang mungkin tidak disangka-sangka, tidak jarang terjadi dalam riwayat manusia. Tapi ada salah seorang dari keluarga St. Sjahrir yang belum dapat mendudukan "logika revolusi" itu, yaitu Buyung, anak yang paling tua tapi baru berumur 5 tahun. Untuk Prawoto anaknya yang paling muda umur 7 tahun. Bagi saya sendiri, Bu Karto, Ibu Mertua, umur 79 tahun. Begitulah dalam dua bulan pertama itu, kami bertiga menderita bingung memikirkan seorang keluarga: Buyung, Bes, dan Ibu karto, yang kalau mencari "logika revolusi" tidak akan mampu menemukan jawabnya. 27)

---

24. Ibid.

25. Ibid.

26. Mohammad Roem, Pelajaran Dari Sejarah, Surabaya: Dokumenta, 1970, hal. 9

27. Ibid. Baca juga A. Syafii Maarif, Op Cit hal. 59-60

Tindakan sewenang-wenang dari yang berkuasa terhadap lawan-lawan politiknya, menurut Roem adalah bagian yang menyatu dengan logika revolusi Soekarno. Ia meniru Gubernur Jendral de Jonge, Hitler, Mussolini, dan Khalifah Harun Al-Rasid. Meskipun ia sendiri sering mengatakan orang tidak dapat lari dari sejarah. Ia sendiri tidak mampu belajar dari sejarah atau menarik pelajaran dari sejarah. 28)

Tidak mampu menarik pelajaran dari sejarah merupakan sisi yang lemah dari kesadaran moral manusia, tidak terkecuali bahkan mungkin terutama penguasa yang haus kekuasaan. Dengan menyebut-nyebut de Jonge, Hitler, Mussolini, dan Harun Al-Rasid, Roem kelihatannya ingin mengingatkan orang bahwa kekuasaan tanpa wawasan moral yang tajam akan bermuara dengan kesewenang-wenangan. Tindakan sewenang-wenang itulah yang diderita oleh sebagian besar lawan-lawan politik Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. 29)

Dala pertemuan tanggal 4 Januari 1959 di rumah Anwar Tjokroaminoto, antara Liga Muslimin, Masyumi dan Partai Persatuan Tarekat Indonesia (PPTI). Hasil pertemuan itu adalah bahwa mereka bersepakat dan bertekad untuk terus memperjuangkan Islam sebagai dasar ne-

---

28. Ibid. hal. 10

29. A. Syafii Maarif, op.cit. hal. 60

gara melalui konstituante. <sup>30)</sup> Di sini kita lihat bahwa untuk menghadapi masalah-masalah yang mendasar, Masyumi masih ikut kelompok Liga Muslimin, tapi dalam menghadapi sistem Demokrasi Terpimpin, jalan yang ditempuh sudah bersibak dua. Pada akhirnya yang dominan dalam menentukan hubungan antara partai-partai Islam itu bukan masalah yang dihadapi dalam Majelis Konstituante, tapi tarikan politik praktis yang memang menggoda itu.

Sebagaimana telah disinggung dimuka tentang pembubaran badan konstituante pada 5 Juli 1959, menyusul parlemen (DPR) hasil pemilihan umum 1955 pada 20 Maret 1960, kemudian Soekarno membentuk DPRGR, dimana Masyumi dan PSI tidak diikutsertakan. Sebagai partai yang dikategorikan penghalang revolusi, Masyumi memang tidak sesuai dimasukkan dalam DPRGR, apalagi Masyumi dianggap terlibat dalam pemberotakan PRRI/Permesta. <sup>31)</sup>

Soekarno pada waktu itu dalam kenyataannya berada di atas konstitusi. Masyumi yang membela mati-matian prinsip negara hukum, akhirnya tidak berdaya menghadapi budaya politik otoriter dibawah selimut UUD 1945. DPR yang menolak Rencana Anggaran Belanja Negara untuk pembangunan mercusuar, telah dibubarkan, apalagi partai Masyumi pasti tidak akan berdaya berhadapan Soekarno.

<sup>30.</sup> Ibid. hal. 61. Liha Duta Masyarakat, 12-1-1959 hal.1. PPTI adalah gerkan tarekat yang kemudian jadi partai politik yang anggotanya lebih kecil dari Perti.

<sup>31.</sup> Ibid.



Memang dengan penuh antusias NU memasuki DPRGR. Surat kabar "Duta Masyarakat" sebagai media resmi NU melukiskan betapa terbukanya sidang Dewan Partai untuk menerima kehadiran DPRGR. Sidang itu berlangsung dari 24-27 April 1960. Pada sidang terakhir Duta Masyarakat menurungkan tajuknya dengan judul "Kepribadian Partai". Dalam tajuk ini dinilai posisi politik NU penting sekali. Adapun isi tajuk itu adalah sebagai berikut:

"Kita setuju kepada siapa saja yang mengatakan bahwa perhatian dunia politik dewasa ini tertuju kepada NU. Dan kita juga dapat memahami bahwa masing-masing perhatian itu beraneka macam maksud dan tujuannya. Sedangkan ada becak tabrakan banyak yang memperhatikan, konon pula kepada suatu partai yang posisinya termasuk yang menentukan jalannya negara dimasa-masa yang akan datang. Mengapa mereka menaruh perhatian? Karena kedudukan NU penting. Apa yang menaruh perhatian kepada hal, apakah kali ini juga NU dapat memberikan penyelesaian terhadap politik yang berat. Artinya mereka sekadar ingin tahu, apakah NU betul-betul suatu partai yang tidak suka kepada rame-rame melulu, dan menghindarkan diri dari pekerjaan koak-koak yang lebih besar bunyinya dari isinya. Apakah NU sanggup berdiri di atas satu garis politik yang kompak apa tidak, sakit sama-sama dipikul, senang sama-sama dirasakan... Kalau kita kaji dalam-dalam, memang benarlah NU memegang posisi yang penting sekali. Karena posisinya yang penting, maka orang-orang lain pun merasa mempunyai kepentingan terhadap posisi yang penting itu. Posisi NU yang penting itu mengakibatkan timbulnya daya tarik yang besar. Maka berkerumunlah unsur-unsur mengelilingi kepentingan ini, mengadakan hal ini itu, pelbagai macam bentuk tingkahnya, pelbagai maksud tujuannya. Hanya ada dua hal yang dapat timbul dari keadaan ini: atau NU tetap dapat mempertahankan dirinya sebagai faktor penting di dalam menentukan jalannya negara di hari-hari yang akan datang, atau sifat pentingnya itu berangsur-angsur kurang karena dikerokoti dari luar.... Pada saat inilah yang sejitu

jitunya Partai NU, di mana Dewan Partainya sedang bersidang di Jakarta, untuk kembali kepada pribadinya yang asli, pribadi yang selalu menempatkan kesemua persoalan di atas satu pertimbangan yang senantiasa menghitung untung rugi, mamfaat dan tidak mamfaat... NU sedang bermain sebagai pelaku utama, sebagaimana banyak kalangan yang juga merindukan untuk tampil menjadi pelaku utama pula. Proses mencari kekuatan! Kewajiban warga NU adalah menjaga kekuatan yang ada ini, itu saja. (33)

Kembali kepada pribadi yang asli, di mata NU adalah pertimbangan untung rugi, mamfaat dan tidak mamfaat dalam menghadapi perkembangan politik. Tegasnya mendukung Demokrasi Terpimpin dengan DPRGR-nya dipandang menguntungkan dan memberi mamfaat kepada NU. Dengan demikian dasar pertimbangan yang utama untuk menerima atau menolak suatu kebijakan politik ialah kepentingan partai, dan NU pada masa permulaan Demokrasi Terpimpin merasa sudah tampil sebagai pelaku utama dalam menentukan jalannya negara, sebagaimana tajuk Duta Masyarakat menerangkan kepada kita. (34)

NU tidak melihat bahwa sesungguhnya peranannya pada priode Demokrasi Terpimpin adalah peran pinggir. Justru yang memegang peranan utama dalam priode itu adalah Soekarno, Angkatan Bersenjata, dan PKI, bukan golongan Islam. Golongan Islam hanyalah untuk meramaikan konsep Nasakom (Nasional, Agama, Komunis), suatu bentuk kerja sama semu yang dipaksakan.

33. Ibid. hal. 62-63

34. Ibid. hal. 63-64

C. Masyumi Tersingkir Dari Arena Politik.

Kehadiran Demokrasi dipimpin bukan hanya mendapat tantangan dari Partai Masyumi dan PSI, sekalipun dua partai inilah yang paling gigih. Beberapa tokoh-tokoh politik dari partai lain yang menentanginya, termasuk dua tokoh dari Nahdatul Ulama yaitu K.H. M. Dahlan dan Imron Rosjadi. Hanya saja dua tokoh ini tidak berhasil menarik partainya ke garis politik mereka. Dengan demikian perlawanan mereka terhadap Demokrasi Terpimpin hanya merupakan tanggung jawab pribadi. Mereka itu tetap dicatat sebagai pahlawan demokrasi. <sup>35)</sup>

Kedua tokoh Nahdatul Ulama itu bergabung dengan Liga Demokrasi, suatu badan perlawanan terhadap Demokrasi Terpimpin yang dibentuk pada 24 Maret 1960. Liga ini dipimpin oleh figur-figur Masyumi, PSI. Liga ini dibentuk mula-mula adalah sebagai protes terhadap pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. <sup>35)</sup>

Pada saat Liga didirikan Soekarno ada di luar negeri, namun setelah Soekarno pulang, ia menunjukkan sikap antinya terhadap Liga itu. Karena itu tidak berapa lama kemudian Liga itu dibubarkan tanpa ada yang mampu mempertahankannya.

35. A. Syafii Maarif. op.cit. hal. 64.

36. Ibid.

Presiden Soekarno bertindak semakin semau gue. Udara politik otoriter semakin kencang tanpa ada kendali undang-undang yang dapat membendunginya, karena Soekarno kelihatannya berada di atas Undang-Undang. Sehubungan dengan itu sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi menunjukkan sikap yang tidak enak lagi, karena partai inilah yang dianggap oleh Soekarno sebagai penghalang utama dalam mengembangkan politiknya.

Presiden Soekarno mulai melancarkan politik pecah belah di dalam tubuh-Partai Masyumi, yaitu terhadap pemimpin-pemimpin Masyumi seperti Sukiman dan Jusuf Wibisono. Kedua tokoh Partai Masyumi ini dikenal amat dekat dengan pemikiran politik Soekarno, sehingga pada waktu Soekarno mengumumkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada 1 April 1960, kedua tokoh Masyumi ini dicantumkan masuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, namun kedua tokoh Masyumi ini menolaknya<sup>37)</sup>

Berbeda halnya dengan tokoh Masyumi lainnya seperti Natsir, Syarifuddin, dan Prawoto, yang dianggap oleh Soekarno sebagai kelompok tokoh Masyumi yang paling menentang terhadap Demokrasi Terpimpin.

---

37. Ibid. hal. 65.

Soekiman dan Jusuf adalah dua tokoh Masyumi yang sangat anti PKI seperti tokoh-tokoh Masyumi lainnya. Tetapi keduanya tidak selalu anti Soekarno, sebagaimana kelompok Matsir sesudah tahun 1951. Soekarno faham betul adanya dua faham atau aliran pikiran dalam tubuh Masyumi, dan karena itu Soekarno memampatkan untuk kepentingan politiknya.

Soekiman, Ketua I Masyumi, telah diangkat sebagai anggota DPRGR tanpa diajak lebih dulu dan dikatakan sebagai mewakili kaum cendekiawan. Sekelipun ia dekat dengan Soekarno, akan tetapi Soekiman ternyata menolak pengangkatan itu dengan menjelaskan :

"Sehari sesudah diumumkan nama-nama orang-orang yang ditetapkan oleh presiden sebagai anggota DPRGR.....Pada malam hari menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 28 Maret yang lalu, saya memutuskan tidak dapat menerima keangkatan saya mewakili cendekiawan; saya mengharapkan dari pemerintah dan khalayak ramai janganlah hendaknya mensalah tafsirkan makna dari keputusan saya itu.... Buat saya sukarlah untuk dalam waktu yang begitu pendek bergeser tanpa konsultasi dengan partai-partai sehaluan lainnya yang baru saja bersama mengadakan kebulatan tekad berdiri di belakang Ketua Parlemen Mr. Sartono, dari tempat dan pendirian, yang menurut ratio, sentimen semangat waktu itu telah saya sadari kebenarannya ke tempat lain, apalagi ke satu posisi, yang bayangan tentang kemungkinan terwujudnya telah membangkitkan serentak semangat menentang bersama dikalangan anggota-anggota Parlemen lama. Sudah barang tentu ada pertimbangan lain, yang turut mendorong saya untuk tidak menerima angkatan saya. Misalnya saja saya tidak mengerti mengapa saya

DIKECUALIKAN dari pada tindakan Presiden untuk meng-EKSITKAN Masyumi dalam usahanya meretool DPR pilihan rakyat, menjadi DPRGR ! Saya ditetapkan di luar tahu dan persetujuan saya sebagai anggota mewakili golongan CENDIKIWAN dalam Lembaga Demokrasi Terpimpin, hingga merasa didudukkan dalam pisisi yang sangat tidak enak... Selain daripada itu dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Tanah Air yang berwujud REVOLUSI NASIONAL, yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berlangsung hingga hari ini, nama saya senangnya tercatat sebagai salah satu dari tokoh-tokoh terkemuka (Top-Figur) Masyumi, apalagi dalam priode Yogya sebelum Republik Indonesia mencapai pengakuan atas kedaulatannya, di waktu mana saya mendapat kehormatan menjadi pengemudi tertinggi dalam perjuangan Ummat Islam, hingga sukerlah kiranya diharapkan daripada saya suatu sikap, yang mengandung unsur "KETIDAK KEPERWIRAAN" bahkan yang bersifat KERENDAHAN BUDI, jika umpamanya sampai terjadi Masyumi dieksitkan dari, dan saya SEDIA dimasukkan dalam DPRGR !. 38.)

Alasan Soekiman untuk menolak pengangkatan dirinya sebagai anggota DPRGR terlihat dari penjelasan yang diberikannya di atas demi mempertahankan integritas pribadinya sebagai pemimpin ummat. Ungkapannya tentang ketidakeperwiraan dan kerendahan budi yang bakal melekat pada dirinya sekiranya keangkatan itu diterimanya, sementara partainya Masyumi dikucilkan, adalah refleksi dari pribadi Soekiman yang punya integritas tinggi dan tahan banting sejarah.

38. Amir Hamzah Wirjosukarto (ed), Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot Dr. Soekiman Wirjosenojo, 1898-1974, (Malang: Yayasan Pusat Pengkajian, Latihan dan Pengembangan Masyarakat, 1984), hal. 301-302

Maka pada waktu itu Masyumi sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Senjata Konstitusional dan negara hukum yang senantiasa dipakai Masyumi untuk mempertahankan eksistensinya sama sekali tidak lagi ampuh berhadapan dengan senjata pamungkas "logika revolusi" Soekarno yang terkenal itu.

Pada masa itu Soekarno secara praktis telah menempatkan dirinya di atas UUD. Dan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa PKI yang sudah semakin dekat dengan Soekarno, memang telah lama bekerja keras untuk menyalpkan Masyumi, saingan sipil yang terkuat. Oleh sebab itu dapat dipahami mengapa Soekarno sewaktu akan menandatangani Keputusan Presiden No. 200/1960 tentang pembubaran partai-partai sengaja memakai ungkapan yang "sedang berontak", agar PKI yang pernah berontak terhindar dari keputusan itu.<sup>39.)</sup>

Secara Yuridis formal dapatkah dipertanggungjawabkan perintah pembubaran Masyumi? Jawaban yuridis tentang hal ini dapat di lihat dari diktum yang diputuskan oleh Musyawarah Nasional III Persahi (Perhimpunan Sarhana Hukum Indonesia) tanggal 3 Desember 1960 yang berbunyi :

----- "Agar partai-partai politik Masyumi dan

<sup>39.</sup> Ibid. hal. 71-72. Lihat juga P.K. Poerwantana, Op Cit. hal. 61-62

PSI serta organisasi KAMI sebagaimana dengan partai Murba, segera direhabilitasi kembali, karena pembubarannya yuridis formal tidak sah dan yuridis materil tidak beralasan dan hanya menjadi korban rezim Orde Lama. 40)

Jauh sebelum itu Mohammad Roem yang mendapat kuasa dari Prawoto telah menggugat perintah Soekarno tentang masalah pembubaran Masyumi itu. Gugatan itu dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 8 September 1960. 41) Sayang gugatan itu tidak pernah disidangkan. Oleh sebab itu benarlah penilaian persahi bahwa Masyumi dan PSI adalah korban rezim Demokrasi Terpimpin.

Sebagai perbandingan dari perbedaan sikap Soekarno terhadap Masyumi dan PSI dan sikapnya terhadap PKI setelah partai ini berontak pada tahun 1965 Kita lihat dialig antara Bernard Dahm dengan Soekarno seperti yang dikutip di bawah ini:

"Mengapa anda tidak melarang PKI? Saya bertanya kepada Soekarno dalam suatu kunjungan ke Indonesia beberapa minggu sebelum ia diturunkan. Anda tidak dapat menghukum seluruh partai lantaran salah tindak dari beberapa orang; jawabnya. Saya katakan kepadanya bahwa ia dapat berbuat demikian pada 1960, pada waktu ia melarang Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia dengan alasan karena mereka tidak menyetujui orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan revolusioner PRRI, yang pada 1958 mengangkat senjata terhadap republik. Masyumi dan PSI adalah pelopor (avantgarde) kekuatan-kekuatan revolusioner, kami memerlukannya bagi

40. Prawoto, Mangkusamito, Menggugat Rezim Soekarno, Panji Masyarakat, No. 50, Th IV (Januari 1970), hal. 12

41. Ibid.

Pelaksanaan keadilan sosial dan (bagi penciptaan( suatu masyarakat yang makmur. 42)

Dari dialog di atas agaknya menjadi semakin jelas bahwa Masyumi dan PSI di mata Soekarno merupakan duri yang memang harus disingkirkan karena kedua partai pembela demokrasi itu dipandang sebagai perintang bagi revolusi menurut visi pencipta Demokrasi Terpimpin itu. Kebencian Soekarno terhadap kedua partai itu, khususnya Masyumi, kita akan telusuri ketegangan Psiko-politik antara pemimpin-pemimpin Masyumi, khususnya Natsir, dengan Soekarno, beberapa bulan setelah terbentuknya Negara Kesatuan dengan UUDS 1950 yang membawa Masyumi mengalami nasib sial dan terpelanting dari panggung sejarah moderen Indonesia. Natsir dalam suatu interviw dengan A. Syafii Maarif, memberikan keterangan yang menarik tentang hal itu:

"Di Yogya selama revolusi saya adalah seorang menteri yang terdekat dengan Soekarno. Sering Soekarno mengundang saya untuk sarapan pagi bersama di Istana. Selama ibukota di Yogya, hampir seluruh pidato Soekarno untuk 17 Agustus diserahkan kepada saya untuk penyusunannya. Bila misalnya saya jauh dari ibukota dalam perjalanan inspeksi, ia akan memanggil saya untuk menyusun pidatonya itu. Hubungan kami begitu eratnya, hingga bila situasi politik makin menghangat dalam dalam menghadapi Belanda dan Soekarno misalnya terpaksa pergi ke luar negeri, maka orang pertama yang harus ajaknya adalah saya. Masa polemik frontara kami yang terjadi pada 1930-an tentang dasar

42. A. Syafii Maarif, Op Cit. . hal. 72-73.  
Lihat juga Bernard Dahm, Soekarno and the Struggle for Indonesian Independence, Ithaca: Cornell University Press, 1969, hal. XII



Perjuangan kemerdekaan Indonesia umumnya kami lupakan. Dan memang seluruh kekuatan harus di padukan untuk menghadapi Belanda, yang ingin meneruskan penjajahannya kembali. Pada tahun 1950 pada waktu memelopori pengajuan mosi dalam parlemen untuk membentuk sebuah negara kesatuan dengan melebur semua negara bagian yang diciptakan Belanda dengan republik Indonesia yang beribu kota Yogyakarta, usaha ini telah berhasil dengan baik. Keberhasilan ini mendorong Soekarno untuk lebih menyukai saya ditunjuk menjadi formatur kabinet dan sekaligus menjadi perdana menteri pertama dari negara kesatuan, sekalipun PNI tidak masuk kabinet. Soekarno bahkan berkata "teruskan sekalipun PNI tidak ikut serta".<sup>43)</sup>

Lukiasan manis bulan madu antara Soekarno dengan Natsir selama tahun-tahun beratnya menghadapi republik ini, tetapi sejarah berjalan terus, teman seperjuangan tidak selalu langgeng. Perbedaan situasi berubah iklim persaudaraan yang tadinya intim menjadi tegang dan panas, serta mengalami gesekan-gesekan yang tajam.

Demikianlah hubungan erat selama ini terjalin antara Soekarno dengan Natsir, Pada tahun 1951 mengalami perubahan drastis. Sebab pokok dari gesekan itu adalah sikap yang berbeda dalam menyelesaikan masalah Irian Barat yang menjadi titik awal dari iklim pa-

---

<sup>43</sup>. Ibid. hal. 74. Lihat juga Hasil Wawancara antara Natsir dan dengan Kasman Songodimedjo dalam Serial Media Dakwa, no. 62, (12 Maret 1978), di Jakarta.

tah arang antara ke dua figur republik, sebagaimana keterangan Natsir berikut:

"Sekalipun menurut UUDS 1950 Soekarno adalah Kepala Negara yang tidak dapat diganggu gugat, ia bukanlah kepala pemerintahan. Dia dapat berbuat apa saja selama perbuatannya itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan kabinet yang telah disetujui parlemen. Tetapi, entah apa sebabnya, Soekarno mulai memanasakan masalah Irian Barat dengan mengatakan: "Sebelum ayam berkokok 1 Januari 1951, Irian Barat harus sudah masuk kepangkuan Republik Indonesia." Tindakan yang demikian itu jelas bukan lagi tindakan seorang kepala negara seperti yang diminta oleh UUDS. Efeknya dapat menjadi sangat besar dan panjang. Pemerintah berpendapat bahwa masalah Irian Barat dapat diselesaikan melalui perjanjian karena ia terikat dengan hukum Internasional, sebagai akibat dari persetujuan KMB 1949. Masalah ini kemudian di bawah ke sidang kabinet untuk dibicarakan, dengan mengundang Soekarno dan Hatta. Soekarno diminta untuk menjelaskan pendapatnya tentang masalah Irian Barat. Setelah pendirian Soekarno dan perdana menteri menjadi 17 menteri anggota kabinet, lalu sistem suara tentang pendapat mereka mengenai Irian Barat; menyokong pendapat Soekarno dengan memutuskan Uni Indonesia-Belanda secara unilateral atau menyokong pendapat perdana menteri. Hasil pemungutan suara adalah lima menyokong Soekarno dan 12 menyokong perdana menteri. Soekarno pada waktu itu benar-benar kecewa. Sejak peristiwa itu hubungan deaya dengan Soekarno menjadi membengkak dan tidak pernah pulih kembali. (44)

Itulah suatu episode dari hubungan antara figur dalam sejarah kontemperer Indonesiayaitu antara Soekarno dengan Natsir. Perbandingan suara 5:12 ternyata telah membawa ekor panjang bagi perjalanan politik Indonesia, atau dengan kata lain, hubungan dua sub-kultur politik Indonesia, yaitu sub-kultur otoriter dan sub-

kultur demokrasi. Bagi Soekarno merupakan sesuatu yang tak tertahankan bila ia dikalahkan dalam suatu pemungutan suara, sesuatu yang seharusnya sangat lumrah terjadi dalam budaya demokrasi. Tapi Soekarno sebagai figur paling puncak pada waktu itu tidak dapat menerima kekalahan suara seperti yang terjadi dalam kabinet itu. Dalam pada itu Natsir yang menurut penilaian John Coast, seorang warga Inggris yang berfihak kepada republik pada waktu perjuangan pisik adalah seorang yang bermoral tinggi.<sup>45)</sup>

Kita kembalikan kepada kaitan politik antara Soekarno, Natsir, dan nasib yang diterima Masyumi pada akhir 1960 itu. Setelah Natsir menggantikan Soekiman sebagai Ketua Umum Masyumi pada 1949, pengaruhnya dalam partai memang sangat besar. Hal ini tidaklah terlalu mengherangkan karena Natsir punya kualifikasi di samping intelek, ia juga kiyai dalam arti bahwa ia cukup fasih berbicara dalam soal-soal agama dengan tema-tema agama, suatu kualifikasi yang tidak dimiliki Soekiman.

Setelah pucuk pimpinan Masyumi tergenggam di tangan Natsir dan kelompoknya, maka di mata Soekarno kelihatannya rumusnya menjadi: Natsir sama dengan Masyumi dan Masyumi sama dengan Natsir. Maka bila Natsir

<sup>45.</sup> John Cast, Ada Saat Genting dan Saat Piknik di Zaman Revolusi, Tempo, No. 45, Th. XVII (9 Januari 1988), hal. 107

turut dalam pemberontakan daerah, berarti Masyumi terlibat pula dalam pemberontakan itu. Suatu rumusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandangan yuridis formal, tapi itulah yang menjadi kenyataan sejarah. Dan terhadap kenyataan ini, seorang sejarawan tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali mengakuinya sebagai suatu kenyataan. 46)

Sejak jatuhnya kabinet Wilopo-Prawoto (PNI-Masyumi), Masyumi di mata Soekarno adalah saingan politik yang sangat mengganggu, apalagi pada akhir tahun 1950-an Natsir tetap tak terkalahkan oleh kelompok Soekiman untuk menduduki jabatan Ketua Umum Partai Masyumi. Natsir dan kelompoknya memang sangat kritis terhadap tindakan-tindakan politik Soekarno sebelum dan selama Demokrasi Terpimpin.

Sebagaimana telah berulang disinggung, bahwa Soekarno dalam mengalahkan lawan-lawan politiknya tidak lagi terikat pada aturan main demokrasi. Salah satu cara rezim Soekarno untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya ialah memenjarakan mereka, baik yang turut dengan pemberontakan daerah maupun yang bukan, selama beberapa tahun tanpa proses pengadilan. Kasman Singodimedjo, salah seorang tokoh Masyumi yang ditahan

---

46 • A. Syafii Maarif, *op cit.* hal. 76-77

itu mengatakan bahwa "dengan UUD 1945 Soekarno dapat berbuat apa saja. UUD 1945 memberi peluang kepada Soekarno untuk jadi diktator,"<sup>142)</sup> Sudah tentu UUD 1945 yang tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Selama Demokrasi Terpimpin, kita harus mengakui bahwa kekuasaan Soekarno demikian besarnya. Fakta inilah yang mendorong Sutan Takdir Alisjahbana seorang intelektual dari PSI yang menyingkir ke Malaysia pada masa Demokrasi Terpimpin, untuk membandingkan Soekarno dengan posisi para raja masa lampau :

"Kedudukan Soekarno sebagai presiden dan sebagai Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, yang tergenggam di tangannya kekuasaan eksekutif legislatif, dan yudikatif, hanyalah berbeda sedikit dengan raja-raja absolut masa lampau, yang mengaku sebagai inkarnasi Tuhan, atau sebagai wakil Tuhan di dunia. ...)

Bagi pimpinan tipe Soekarno akan sulit untuk dapat dipegang budaya perbedaan pendapat. Itulah sebabnya kita dapat memahami mengapa orang-orang tipe Natsir dan kelompoknya dipandang bernahaya di mata Soekarno, apalagi mereka yang sudah sejak dini melawan sistem politik yang diciptakannya. Natsir pernah menilai sistem itu dengan mengatakan :

"...bahwa segala-galanya akan ada di dalam demokrasi Terpimpin itu, kecuali demokrasi. Segala-galanya mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa. Segala-galanya mungkin ada kecuali kehormatan dan martabat pribadi manusia. Dalam istilah biasa semacam itu kita namakan satu diktatur sewenang-wenang. ...)

Gaya kritik yang semacam itu terasa begitu tajam dan menyayat, tapi sebenarnya masi dalam batas-batas kesopanan politik. Sebagai orang yang merasakan benar betapa panasnya sistem Demokrasi Terpimpin itu, Natsir tentu punya hak sepenuhnya untuk menilai sistem itu. Apalagi setelah peristiwa patah arang antara Soekarno dan Natsir pada tahun 1951, lantaran kritik semacam itu adalah wajar belaka, sekalipun berakibat buruk bagi Masyumi.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1960, maka pada 13 September 1960 Pimpinan Partai Masyumi menyatakan partainya bubar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan presiden itu. Hilangnya Masyumi dan PSI dari pelataran sejarah moderen Indonesia dapat diartikan robohnya pilar-pilar demokrasi dan merapuhnya Indonesia sebagai negara hukum yang dengan gigih diperjuangkan oleh mendian ketua partai ini. (50)

---

47. Ibid. hal. 77

48. S. Takdir Alisjahbana, Indonesia Sosial and Cultural Revolution, terj. by, Benedict R. Anderson, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966, hal. 17

49. Yusuf Abdullah Puar, Trias Politika RI Sering digugat, Panji Masyarakat, No. 250, Th. XX (Juli 1978), hal. 23

50. A. Syafii Maarif, op cit. hal. 79. Lihat juga Poerwantana, op cit. hal. 61-62

BAB V

P E N U T U P

Keberadaan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan bukanlah merupakan suatu kebetulan dalam sejarah yang tidak dilatar belakangi oleh suatu kesadaran yang dalam, akan tetapi keberadaan Partai ini dapat dikatakan sebagai suatu keharusan sejarah bagi perjalanan politik umat Islam Indonesia.

Masyumi telah merumuskan tujuan jangka panjangnya yang hendak diraih dalam perjuangan politiknya terlihat dalam anggaran dasarnya yaitu terlaksananya ajaran Agama Islam (hukum Islam) di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia, khususnya Di Sulawesi Selatan.

Peranan Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan gejolak-gejolak politik yang terjadi di Sulawesi Selatan dan dalam proses penataan pemerintahan. Hal ini tidak bisa disangkal lagi bahwa peranan Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan cukup penting artinya.

Demikian juga mengenai proses otonomi pemerintahan di Sulawesi Selatan, dimana peranan Partai Masyumi di daerah ini cukup memuaskan, sekalipun di daerah ini diliputih oleh berbagai guncangan-guncangan yang merongrong stabilitas pemerintahan di daerah ini.

Dalam perjalanan sejarah moderen Indonesia kita memang tidak meragukan kejujuran Partai Masyumi dalam membela dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu pluralisme sosial dan budaya, yang secara kuantitatif daerah ini merupakan mayoritas mutlak yang beragama Islam. Secara umum, bahwa perilaku politik Partai Masyumi selama periode kejayaannya hampir - hampir tanpa cacat. Pemihakannya terhadap republik begitu jelas, konsisten dengan penuh perhitungan.

Secara umum bahwa orientasi perjuangan Partai Masyumi adalah menciptakan suatu masyarakat yang bercorak Islam, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekalipun dalam perkembangannya, terutama setelah pemilihan umum banyak mendapat tantangan-tantangan, terutama dari pihak presiden sendiri.

Partai Masyumi tidak mampu membendung ideologi yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno, menyebabkan partai Masyumi jatuh kelembah kehancuran, sekalipun dengan gigih Partai ini menentang ideologi Soekarno itu. Bahkan Soekarno menganggapnya sebagai partai yang kepala batu.

Partai Masyumi Melihat tindakan-tindakan Presiden Soekarno yang mengarah kepada suatu pemerintahan otoriter, dan menempatkan dirinya di atas dari Undang-Undang Dasar. Hal ini terlihat keputusan-keputusan yang diambil banyak tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku pada waktu itu.

Dilihat dari penerapannya sistem Demokrasi terpimpin itu adalah sebuah penyimpangan dari sistem demokrasi yang diinginkan Bangsa Indonesia. Golongan komunis yang percaya kepada ideologi totaliter telah mempengaruhi cara berpikir Presiden Soekarno dan mencoba mendorongnya untuk menciptakan suatu politik yang asing bila dilihat dari perspektif Undang-Undang Dasar 1945.

Partai Masyumi sebagai cagar demokrasi kelihatannya tak punya pilihan lain kecuali berhadapan dengan sistem Soekarno. Sekalipun tenaga yang tidak seimbang, karena harapan Partai Masyumi bahwa rakyat akan berpihak kepadanya atau kepada demokrasi, tidak kepada sistem yang otoriter ternyata sia-sia. Sementara itu pihak Partai Komunis Indonesia yang sangat lihai dalam manipulasi politik berpihak kepada sistem Soekarno. Orang pun akan tahu bahwa salah satu tujuan dari Partai Komunis Indonesia adalah untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya, dan yang terbesar adalah Partai Masyumi.

Sutan Takdir Alisjahbana, seorang intelektual Partai Sosialis Indonesia memberikan perbandingan pemerintahan Soekarno pada waktu itu dengan posisi para raja masa lampau, bahwa kedudukan presiden sebagai pimpinan besar revolusi yang terganggu di tangannya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanyalah berbeda sedikit dengan raja-raja dahulu yang mengaku sebagai inkarnasi Tuhan atau sebagai wakil Tuhan di dunia ini.

Natsir menilai sistem Soekarno itu bahwa segala galanya ada dalam Demokrasi Terpimpin kecuali Demokrasi yang berdasarkan UUD 1945., segala-galanya ada kecuali kebebasan jiwa, dan kehormatan dan martabat pribadi manusia. Dalam istilah biasa dinamakan satu diktator sewenang-wenang. Memang Muhammad Natsir di mata Soekarno sama dengan Partai Masyumi dan sebaliknya. Maka oleh karena Natsir bersama dengan Pemimpin Partai Masyumi lainnya terlibat dalam PRRI/Permesta, maka partai ini harus disingkirkan.

Dengan dikeluarkannya keputusan presiden nomor 200 tahun 1960, yang diumumkan pada 17 Agustus 1960, tentang pembubaran partai-partai politik yang terlibat langsung tokoh-tokohnya dalam PRRI/Permesta. Dengan dasar itu maka pada 13 September 1960 pimpinan Partai Masyumi menyatakan partainya bubar untuk memenuhi ke-

Sutan Takdir Alisjahbana, seorang intelektual Partai Sosialis Indonesia memberikan perbandingan pemerintahan Soekarno pada waktu itu dengan posisi para raja masa lampau, bahwa kedudukan presiden sebagai pimpinan besar revolusi yang terganggu di tangannya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanyalah berbeda sedikit dengan raja-raja dahulu yang mengaku sebagai inkarnasi Tuhan atau sebagai wakil Tuhan di dunia ini.

Natsir menilai sistem Soekarno itu bahwa segala galanya ada dalam Demokrasi Terpimpin kecuali Demokrasi yang berdasarkan UUD 1945., segala-galanya ada kecuali kebebasan jiwa, dan kehormatan dan martabat pribadi manusia. Dalam istilah biasa dinamakan satu diktator sewenang-wenang. Memang Muhammad Natsir di mata Soekarno sama dengan Partai Masyumi dan sebaliknya. Maka oleh karena Natsir bersama dengan Pemimpin Partai Masyumi lainnya terlibat dalam PRRI/Permesta, maka partai ini harus disingkirkan.

Dengan dikeluarkannya keputusan presiden nomor 200 tahun 1960, yang diumumkan pada 17 Agustus 1960, tentang pembubaran partai-partai politik yang terlibat langsung tokoh-tokohnya dalam PRRI/Permesta. Dengan dasar itu maka pada 13 September 1960 pimpinan Partai Masyumi menyatakan partainya bubar untuk memenuhi ke-

tentuan-ketentuan dalam keputusan presiden itu. Dengan hilangnya Partai Masyumi dari pelataran sejarah dapat diartikan robohnya pilar-pilar demokrasi yang senengotiasa diperjuangkan Partai Masyumi. Demikian juga bahwa dengan hilangnya Partai Masyumi berarti robohnya perjuangan ummat Islam dalam usahanya memperjuangkan suatu masyarakat yang bercorak Islam.

Jadi dengan demikian setelah dikeluarkannya keputusan presiden sebagaimana yang tersebut di atas maka berakhirilah perjuangan Partai Masyumi, baik yang ada di pusat maupun di daerah, berarti termasuk Partai Masyumi cabang Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Dokumen.

- A. Arsip Nasional Republik Indonesia Perwakilan Ujung Pandang Koleksi H.A.R. Tamma, No. Reg. 544. Bagian I, II.
- B. Bauty, Yusuf, Pemecahan Soal Politik Indonesia Timur Khususnya Di Sulawesi Selatan Edisi Istimewa, Mingguan Berjuang, (Kamis 19 Juni 1950).
- Bauty, Yusuf, Pandangan Umum Tentang Keadaan Politik Dan Rakyat Di Pedalaman Sulawesi Selatan, Berjuang, No. 4. Th. I (12 Juni 1950).
- Mas, Pembentukan Daerah-Daerah Agak Sulit, Berjuang, No. 12. Th. I, (25 September 1950)..
- Masiara, Mingguan Berjuang, No. 12 Th. I, (25 September 1950).

### II. Buku.

- Abdullah, Taufik, (ed), Sejarah Lokal Di Indonesia, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Agenda Kementerian Agama Republik Indonesia 1951-1952, Jakarta: Kementerian Agama RI., 1951.
- Alfian, Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1978.
- Budiardjo, Miriam, Prof., Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Dahm, Bernard, Soekarno And The Struggle For Indonesia Independence, Ithaca: Cornell University Press, 1969.
- Dijk, Van, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Ghasali, Zulfiker, DPA Dalam Sejarah Konstitusi Republik; Hukum Dan Pemerintahan, No. 5. Th. XVI, (Oktober 1986).

- Gonggong, Anhar, Abdul Qahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Harvey, Barbara Sillars, Per mesta; Pemberontakan Setengah Hati, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Kadir, Harun, dkk., Sejarah Daerah Sulawesi Selatan, Jakarta: Dep.Dik.Bud., 1978.
- Kartodirdjo, Sartono, Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Kweit, Mary Grizes, Robert W. Kweit, Konsep Analisa Politik, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Legge, J.D., Soekarno A Political Biografi, New York-Woshinton: Praeger Publishers, 1972.
- Maarif, Syafii, Islam Dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1988.
- Mattulada, Prof. DR., Latoa; Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, (Desertasi Doktor Pada Universitas Indonesia), Jakarta: 1975.
- \_\_\_\_\_, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah, Jakarta: Bakti Baru Berita, Utama, 1982.
- Muzakkar, Abdul Kahar, Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia, (Tanpa Kota), Hasanuddin, (Tanpa Tahun),
- Noer, Daliar, The Modernist Muslim Movement In Indonesia 1900-1942, Singapura-Kualalumpur: Oxford University Press 1973.
- Paweloy, Sarita, Arus Revolusi Di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang: Dewan Daerah Angkatan 45 Prop. Sul.Sel. Masa Bakti 1985-1989,.

- Poerwantana, P.K., Partai Politik Di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Polinggomang, Edward L., Pembahasan Fakta Dan Penelitian Dalam Kajian Sejarah, Makalah, Dalam Seminar Bulan Bahasa Dan Hut XXXIII Fak. Sastra Unhas, Ujung Pandang: Fak. Sastra Unhas, 28 Oktober 1992.
- Reinhardt, John M.C. Ewen, Nationalism and Confrontation Southeast Asia Island; The Sources of Indonesian Foreign Policy, (Desertasi Ph.D. Tulane University, Louisiana, 1967.
- Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Roem, Muhammad, Pelajaran Dari Sejarah, Surabaya: Dokumenta, 1970.
- Ruslikarim, Perjalanan Partai Politik Di Indonesia. Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta: CV. Raja Wali, 1983.
- Sastroamijoyo, Ali, Tonggak-Tonggak Diperjalanku, Jakarta: Kinta, 1974.
- Soebagijo, I.N. Sudiro Pejuang Tanp Henti, Jakarta Gunung Agung, 1981.
- Soejito, Irawan, Sejarah Pemerintahan Daerah-Daerah Di Indonesia, Jakarta: Paradnya Paratama, 1984.
- Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
- Sundaussen, Ulf, Politik Militer Indonesia 1945-1965 Menuju Dwi Fungsi ABRI, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Syaltut, Mahmud, Al Islam Aqidah wa Sari'sh, Kairo: Daul al Qalam, 1966.
- Wilhelm, Donald, Indonesia Bangkit, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981.

Wirjosukarto, Amir Hamzah, (ed), Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot Dr. Soekiman Wiryo-sanjojo 1898-1974, Malang: Yayasan Pusat Pengkajian Latihan Dan Pengembangan Masyarakat, 1984.

### III. Majalah.

Anshary, Isa, M., Musyawah Nasional Daulah Islamiyah, No. 9. Th. I. (September 1951)

Cost, John, Ada saat Genting Ada Saat Piknik Di Zaman Revolusi, Tempo, No. 45. Th. XVII (9 Januari 1988).

Mangkusamito, Prawoto, Menggugat Rezim Soekarno, Panji Masyarakat, No. 50. Th. IV, (Januari 1970)

Masjkur, K.H., Wawancara, Dalam Serial Media Dakwah, No. 62. (Agustus 1979).

Pimpinan Wilayah Masyumi Jawa Timur, Hari Ulang Tahun Partai Masyumi KeXI, Surabaya, 1956.

Puar, Yusuf Abdullah, Trias Politika Republik Indonesia Sering Digugat, Panji Masyarakat, No. 250. Th. XX, (Juli 1978).

Saidi, Ridwan, Panji Masyarakat, No. 541. Th. XXVIII, (Juni 1987).

Singodimedjo, Kasman, "Wawancara", Dalam Serial Media Dakwah, No. 62, (12 Maret 1979).

